

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana
Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh : Dilatul Aghniya

NIM : 2005046026

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Dilatul Aghniya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama inikami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Dilatul Aghniya

Nim : 2005046026

Jurusan : SI Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.
Akt. CA, CPA, CRA, CRP
NIP.198001282008011010

Pembimbing II

Mashilal SEL, M.Si

NIP. 198405162019031005

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Dilatul Aghniya
NIM : 2005046026
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)

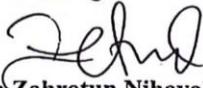
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal: **27 Desember 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

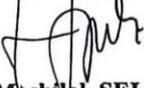
Semarang, 27 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Sidang


Ana Zahrotun Nihayah, S.E. M.A.
NIP. 198907082019032018

Sekretaris Sidang


Mashjal, SEI, M.Si
NIP. 198405162019031005

Penguji Utama I


Siti Nurneaini, S.Sos.I, M.Si
NIP. 198312012015032004

Penguji Utama II

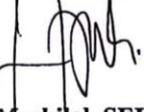



Singgih Muheramtohad, S.Sos.I
NIP. 198210312015031003

Pembimbing I


Dr. Ratri Agriyanto, M.Si, Akt. CA,
CPA, CRA, CRP
NIP. 198001282008011010

Pembimbing II


Mashjal, SEI, M.Si
NIP. 198405162019031005

MOTTO

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا

“Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu)”

(Q.S An Nisa’ 4: Ayat 45)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan benar dan tepat pada waktunya. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua saya, Ayahanda M. Ali Aminudin sebagai panutan dan cinta pertama penulis, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang paling besar yang engkau berikan untuk gadis kecilmu ini, terimakasih karena selalu bekerja keras dan berjuang tanpa kenal lelah untuk kehidupan saya. Serta untuk wanita cantik dan pintu syurgaku, ibunda Maratussolikha, wanita hebatku yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran sampai dengan detik ini. Terimakasih atas semua do'a dan dukungan mama dan papa sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menyaksikan kesuksesan saya. *I love you so much.*
2. Adikku tercinta, Afika Umniatun Nu'ma. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya serta sudah menjadi *Mood boster* dan alasan penulis untuk pulang ke kampung halaman selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Keluarga besar Abdul Rosyid dan Sarif, terimakasih atas motivasi yang tak hentinya diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
4. Teman-teman terdekatku, Dina Arum, Indah Kaharunia, Mewah Aprilia, dan Sawsan Arif. Terimakasih karena kalian telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta senantiasa sabar mendengarkan keluh kesah peneliti.
5. Kakak selama di perantauan, Irma Khoirinnisa terimakasih telah memberikan bantuan dengan ikhlas dan meluangkan waktunya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Untuk keluarga besar Tax Center, terimakasih atas kerjasama dan pengalaman yang sangat berharga selama berproses di bangku perkuliahan.

7. Untuk teman-teman seperjuangan program studi akuntansi syariah khususnya AKS-A 2020 yang selalu senantiasa kebersamai dari awal bangku perkuliahan sampai dengan saat ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini walaupun banyak sekali tekanan dan rintangan yang ada, namun tak pernah ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, keyakinan, dan kejujuran. Maka dari itu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)” tidak pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh pihak lain. Skripsi ini tidak mengandung argument atau pemikiran orang lain, melainkan informasi yang diperoleh dalam skripsi ini dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penulis.

Semarang, 6 Desember 2023

Penulis  
Dilatul Aghniva

NIM. 2005046026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya terdapat beberapa istilah Arab, Nama orang, judul buku, nama instansi/Lembaga, dan lain sebagainya yang harus disalin ke dalam huruf latin. Maka dari itu, untuk menjamin konsistensi yang perlu ditetapkan pada suatu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Konsonan dalam sistem penulisan Bahasa Arab ini dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini terdapat beberapa yang dilambangkan dengan huruf, tanda, serta huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf-huruf arab beserta transliterasinya dengan menggunakan Bahasa latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada lambang	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	Dh	De (Dengan titik dibawah)

ط	Tha'	Th	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam Bahasa arab Hampir sama dengan vocal Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vocal tunggal atau monoflog dan vocal rangkap atau diftong

➤ Vokal Tunggal (Monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kahrah	I	I
اُ	Dhamah	U	U

➤ Vokal Rangkap (Diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya'	ay	a-y
وَا	Kahrah dan wau	au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan satu buah tanda yaitu tanda tasydid dan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf konsonan ganda (ّ).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (ال) yang dibaca dan ditulis dengan huruf al. contohnya الملك (*al-malik*). Penulisan Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

E. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah dalam penulisan arab ditulis dengan huruf “h” contohnya والملائكة (*wal-malaikah*).

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran/pungutan wajib rakyat kepada negara yang diatur undang-undang sebagai sumber pendapatan negara yang dananya akan dialokasikan untuk kebutuhan negara contohnya yaitu dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Convenience Sampling*. Data yang diperoleh berupa data primer dan diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebanyak 33.294 para pelaku UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dan dilakukan penelitian dengan penyebaran kuisisioner lalu dilakukan uji statistik menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan variabel kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kondisi Ekonomi, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution/levy from the people to the state which is regulated by law as a source of state income whose funds will be allocated for state needs, for example in development. This research aims to determine the influence of the level of understanding of tax regulations, the level of trust in the government, modernization of the tax administration system, and economic conditions on the compliance of Ssemarang City UMKM taxpayers.

This research uses a quantitative approach with a sampling technique, namely *Convenience Sampling*. The data obtained was in the form of primary data and processed using the IBM SPSS 25 application. In this research, the population used was 33.294 UMKM actors obtained from the Semarang City cooperative and UMKM Service. The sample obtained in this research amounted to 100 respondents and the research was carried out by distributing questionnaires and carrying out statistical tests using multiple linear regression analysis.

The result of this research show that the variable level of understanding of tax regulations and the variable modernization of the tax administration system have a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance. Meanwhile, the variable level of trust in the government and the variable economic conditions have no effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayers, Level of understanding of tax regulation, level of trust in the government, modernization of the tax administration system, economic conditions, and Taxpayes compliance.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai penguasa alam semesta, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Setelah melewati berbagai macam tahapan, akhirnya pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dan berjalan lancar atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashilal, M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Progran S1 Akuntansi Syariah dan jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak M. Ali Aminudin dan Ibu Maratussolikha yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis.
7. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah I yang telah memberikan izin penelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantau dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Semarang, 6 Desember 2023

Penulis

Dilatul Aghniya

NIM. 2005046026

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)	10
2.2 Variabel Dependent	12
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	12
2.3 Variabel Independent	13
2.3.1 Tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X1).....	13
2.3.2 Tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2)	16
2.3.3 Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)	17
2.3.4 Kondisi ekonomi (X4)	19
2.4 Penelitian Terdahulu.....	20
2.5 Rumusan Hipotesis	29

2.5.1	Pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	29
2.5.2	Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	31
2.5.3	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	32
2.5.4	Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	33
2.6	Kerangka Berfikir Penelitian.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Sumber Penelitian.....	35
3.2.1	Data Primer.....	35
3.2.2	Data Sekunder.....	36
3.3	Populasi dan Sampel.....	36
3.3.1	Populasi.....	36
3.3.2	Sampel.....	37
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4.1	Kuisisioner.....	38
3.4.2	Dokumentasi.....	39
3.5	Variabel Penelitian.....	39
3.5.1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	40
3.5.2	Tingkat Pemahaman peraturan perpajakan (X1).....	40
3.5.3	Tingkat Kepercayaan pada pemerintah (X2).....	40
3.5.4	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3).....	40
3.5.5	Kondisi ekonomi (X4).....	40
3.6	Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	44
3.7	Uji Instrumen Penelitian.....	44
3.7.1	Uji Validitas.....	44
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	45
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.8.1	Uji Multikolinieritas.....	45
3.8.2	Uji Normalitas.....	45

3.8.3	Uji Heteroskedasitas.....	46
3.9	Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
3.10	Pengujian Hipotesis.....	47
3.10.1	Koefisien determinasi.....	47
3.10.2	Uji statistik F.....	47
3.10.3	Uji Statistik T.....	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	49
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang.....	49
4.1.2	Topografi Kota Semarang.....	49
4.1.3	Gambaran Umum UMKM Kota Semarang.....	50
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	51
4.2.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2.2	Deskripsi Responden Penelitian.....	52
4.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
4.3.1	Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1).....	57
4.3.2	Deskripsi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2).....	58
4.3.3	Deskripsi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3).....	59
4.3.4	Deskripsi Kondisi Ekonomi (X4).....	61
4.3.5	Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	62
4.4	Teknik Analisis Data.....	63
4.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.4.2	Uji Validitas.....	64
4.4.3	Uji Reliabilitas.....	68
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	70
4.5.1	Uji Multikoleniaritas.....	71
4.5.2	Uji Normalitas.....	72
4.5.3	Uji Heteroskedasitas.....	73
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
4.6.1	Koefisien Determinasi (R ²).....	78
4.6.2	Hasil Uji Hipotesis (Uji T).....	68
4.6.3	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	81
4.7	Pembahasan dan Analisis Data.....	82

4.7.1	Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	82
4.7.2	Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	83
4.7.3	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
4.7.4	Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
BAB V PENUTUP		89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran	90
5.3	Batasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN-LAMPIRAN		97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besar Ratio Pajak di Berbagai Negara	2
Tabel 1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang	3
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Variabel dan Pengukuran Indikator.....	41
Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert	43
Tabel 4.1 Distribusi Sampel	51
Tabel 4.2 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.4 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Alamat.....	53
Tabel 4.5 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis UMKM.....	54
Tabel 4.6 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Kriteria UMKM.....	55
Tabel 4.7 Kategori Penilaian Analisis Deskriptif	56
Tabel 4.8 Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	57
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskripsi Total Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	58
Tabel 4.10 Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	59
Tabel 4.11 Hasil Statistik Deskripsi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	60
Tabel 4.12 Hasil Statistik Deskripsi Kondisi Ekonomi (X4)	61
Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	62
Tabel 4.14 Hasil Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Uji Validitas	65
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas	67
Tabel 4.17 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov	72
Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser	74
Tabel 4.22 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	76

Tabel 4.23 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78
Tabel 4.24 Hasil Uji Parsial (Uji T)	79
Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan (Uji F)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot	73
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scaterplot	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuisisioner Penelitian.....	97
Lampiran 2.1 Tabulasi Jawaban Responden	104
Lampiran 3.1 Hasil Output SPSS	117
Lampiran 3.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	117
Lampiran 3.1.2 Hasil Uji Deskriptif Responden Penelitian	118
Lampiran 3.1.3 Hasil Uji Coba Uji Validitas	119
Lampiran 3.1.4 Hasil Uji Validitas	126
Lampiran 3.1.5 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas.....	132
Lampiran 3.1.6 Hasil Uji Reliabilitas	133
Lampiran 3.1.7 Hasil Uji Multikolinearitas	134
Lampiran 3.1.8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov .	135
Lampiran 3.1.9 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	135
Lampiran 3.1.10 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	136
Lampiran 3.1.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	136
Lampiran 3.1.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scaterplot	137
Lampiran 3.1.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	137
Lampiran 3.1.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	137
Lampiran 3.1.15 Hasil Uji Parsial (Uji T)	138
Lampiran 3.1.16 Hasil Uji Simultan (Uji F)	138
Lampiran 4.1 Balasan Surat Izin Riset dari Direktorat Jenderal Pajak	139
Lampiran 5.1 Balasan Surat Izin Riset dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	140
Lampiran 6.1 Dokumentasi	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran/pungutan wajib rakyat kepada negara yang diatur undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sangat memerlukan dana dalam mendukung kebutuhan negara contohnya yaitu dalam pembangunan. Dana pembangunan bisa didapatkan dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya yaitu pajak.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, kita harus memenuhi kewajiban kita dengan membayar hak negara Indonesia yaitu membayar pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Hasil dari pembayaran pajak sangatlah berperan penting guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak juga bisa diartikan dengan iuran wajib yang harus dipenuhi oleh rakyat Indonesia kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Pajak juga memiliki fungsi yang penting bagi perekonomian suatu negara yaitu menjadi fungsi untuk sumber dana negara yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan negara, maupun dipergunakan untuk keperluan pemerintah seperti kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pajak dipergunakan oleh pemerintah untuk mengatur serta melakukan kebijakan dalam bidang ekonomi, akan tetapi faktanya pemungutan pajak masih cukup sulit dilaksanakan yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.¹

¹ Alfiyatul Umniyah and others, ‘The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable’, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>.

Menurut Hangga Surya Prayoga selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan perpajakan (PSEP) *Tax ratio* Indonesia masih rendah dan masih dibawah *tax ratio* rata-rata atau *lower middle income country* seperti masih rendahnya tingkat kepatuhan karena biaya kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi serta kurang bersaingnya tarif pajak di Indonesia dibanding negara-negara di ASEAN. Menurut *Organisation for Economic Coperation and Development* (OECD) mengatakan bahwa tingkat rasio pajak Indonesia masih rendah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Besar Ratio Pajak di berbagai negara

Jangka waktu (tahun)	Negara	Besar Ratio pajak (%)
2018-2020	Indonesia	10-12%
2018-2020	Singapura	13-14%
2018-2020	Malaysia	12-15%
2018-2020	Philipina	17-18%
2018-2020	Thailand	17-17,5%
2018-2020	Brunei Darussalam	24,2%
2018-2020	Vietnam	18%
2018-2020	Eropa	41%

Sumber: <https://www.idxchannel.com/economics/tax-ratio-indonesia-masih-tertinggal-oleh-malaysia-thailand-hingga-filipina>

Pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa besarnya presentasi *tax ratio* pajak di Indonesia masih dikatakan rendah dilihat dari masih jauhnya rata-rata *tax ratio* pajak Indonesia yang sebesar 11,9% yang masih dibawah rata-rata dengan negara yang tergabung dalam OECD yang menyebut rata-rata *tax rationya* sebesar 34,3%. Oleh sebab itu penerimaan pajak di Indonesia harus lebih dimaksimalkan kembali melihat rendahnya rasio pajak yang ada di Indoensia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Menurut data yang di rilis oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UMKM) yang diolah dari Badan Pusat Statistik

(BPS), sepanjang tahun 2022 UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dimana angka kenaikannya mencapai 8,71 juta unit.

UMKM menjadi salah satu sektor yang berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia. Walaupun omset yang didapat lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Pertumbuhan UMKM di Negara Indonesia ini semakin meningkat seperti di kota-kota besar yang tersebar luas di Indonesia salah satunya yaitu Kota Semarang. Berikut ini jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang per Maret 2023 yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang:

Tabel 1.2

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.	2018	14.789
2.	2019	17.546
3.	2020	17.546
4.	2021	17.600
5.	2022	30.407
6.	Per Maret 2023	33.294

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Semarang mengalami kenaikan sebanyak 2.000 sampai 3.000 UMKM di setiap tahunnya terhitung mulai pada tahun 2018 hingga per Maret 2023. Terlihat pada tahun 2018 terdapat 14.546 UMKM di Kota Semarang. Lalu ditahun 2019 meningkat sebanyak 17.546 serta pada tahun 2020 meningkat sebanyak 17.546 dan di tahun 2021 meningkat sebanyak 17.600. pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 30.407 dan per Maret 2023 meningkat cukup tinggi sebanyak 33.294. Hal ini dapat membantu perekonomian di Kota Semarang. Namun, dengan meningkatkan jumlah pelaku UMKM ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang didapatkan dari hasil UMKM, karna pada faktanya Pemerintah telah menurunkan tarif PPH final bagi sektor UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8

miliar dalam setahun. Hal tersebut dilakukan karena masih minimnya kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi wajib pajak yaitu para pelaku UMKM mengenai pajak, sebab dalam hal ini pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara dan dengan adanya pajak yang besar penerimaan negara pun menjadi besar.² Namun, disisi lain Direktorat Jenderal Pajak pun sudah menerapkan beberapa kebijakan bagi para wajib pajak yang memiliki usaha bebas seperti pemberlakuan insentif pajak, dengan adanya insentif pajak yang diberikan ini diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak serta melaporkan SPT Tahunannya.³ Berikut ini data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1:

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%
2019	302.219	46.057	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.595	29,17%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah 1

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan hal yang paling menonjol yaitu adanya penurunan yang cukup signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun wajib pajak

² Warno and Ulul Fahmi, 'Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45', *El Muhasaba : Jurnal Akuntansi*, 11.2 (2020), 188–201.

³ Ratno Agriyanto and others, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 235–43.

yang terdaftar di setiap tahunnya meningkat terlihat pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 44,52% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 285.646 dan wajib pajak badan sebanyak 43.057 dengan total wajib pajak terdaftar yaitu 328.703. lalu di tahun 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu banyak yaitu sebesar 44,68% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 302.219 dan wajib pajak badan sebanyak 46.168 dengan total wajib pajak terdaftar yaitu 348.387. Tahun selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 39,93% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 337.087 dan wajib pajak badan sebanyak 53.883 dengan total wajib pajak terdaftar yaitu 390.970. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak 32,02% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 527.857 dan wajib pajak badan sebanyak 57.165 dengan total wajib pajak terdaftar yaitu 528.079. tidak hanya itu, di tahun 2022 pun terus mengalami penurunan sebesar 29,17% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 539.274 dan wajib pajak badan sebanyak 58.256 dengan total wajib pajak terdaftar yaitu 597.530.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu tingkat pemahaman peraturan perajakan. Dalam hal ini pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib paja. Namun, tidak semua wajib pajak dapat memahami terkait peraturan perpajakan seperti dalam hal nya pelaporan SPT Tahunan masih terdapat beberapa wajib pajak yang pada tahap akhir pengisian SPT nya berstatus kurang atau lebih bayar sehingga tidak dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan nya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait tingkat pemahaman peraturan perpajakan. Menurut penelitian Nathania Aldisa Olivandy, dkk pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.⁴ Sependapat dengan penelitian Sri Wulandari dan Astri

⁴ Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19," *Wahana Riset Akuntansi*, vol.9, no. 2, (2021), 91–105.

Fitria⁵ serta Rinaldi Zentira Fikri⁶ yang sama-sama memberikan hasil penertian bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh⁷ Serta pada penelitian Yuwita Ariessa Pravasanti⁸ yang menghasilkan penelitian berupa pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah. Dalam hal ini para pemerintah atau aparat pajak juga menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Para aparat pajak harus memberikan contoh yang baik terhadap para masyarakat atau wajib pajak supaya mereka dapat percaya pada pemerintah atau aparat pajak dan tidak malas untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat. Menurut penelitian Olivandy, dkk⁹ dan Rimawati Qadariah, dkk¹⁰ yang sama-sama memberikan hasil bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Saongko¹¹ yang menghasilkan penelitian bahwa tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

⁵ Sri Wulandari and Astri Fitria, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no.7, (2021), 1–18.

⁶ Rinaldi Zentira Fikri and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM', *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7.2 (2020), 294–305.

⁷ Rizky Pebrina and Amir Hidayatulloh, "Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, vol.17, no.1, (2020), 1–8.

⁸ Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol.21 no.01 (2020), 142–151.

⁹ Olivandy, Astuti, and Siddiq, op.cit.

¹⁰ Rimawati Qadariah, Nur Daiana, and Junaidi, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Norma Subjektif Kualitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jra*, vol.10, no.07, (2021), 13–24.

¹¹ Diah Wahyu Wijayanti and Noer Saongko, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)," *Journal Peran Profesi Akutansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, (2016), 308–326.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perkembangan digital saat ini dalam hal ini modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan e-sistem yaitu contohnya E-Dilling yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Namun, tidak semua wajib pajak paham terkait pelaporan SPT menggunakan E-Filing. Menurut penelitian Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari¹² yang hasil penelitiannya memberikan pendapat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Zulaicha Efrita Sarasawati¹³ Yang memberikan hasil penelitian bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan diatas. Maka pada penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel independen yang sama dengan ketujuh penelitian diatas yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan, variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Tujuan dari digunakannya kembali ketiga variabel tersebut yaitu apakah variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan yang menjadikan orisinalitas pada penelitian ini yaitu terletak pada modifikasi penggunaan variabel penelitian atau penambahan variabel penelitian berupa variabel kondisi ekonomi. Karena dilihat dari omset atau laba yang didapatkan pada sektor UMKM yang tidak menentu setiap tahunnya, adanya penurunan permintaan,

¹² Nurma Risa and Mayta Rizky Puspita Sari, "Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bekasi," *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, vol.12, no.83, (2021), 20–37.

¹³ Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, and Riana Rachmawati Dewi, 'Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta', *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2.02 (2018), 45–52.

akses bahan baku yang tidak menentu dan masih rendahnya SDM berdampak pada kenaikan bahkan penurunan pendapatan dan omset UMKM sehingga besar kemungkinan para UMKM akan mengalami kendala dalam membayar pajak karena hal tersebut dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat biaya yang menjadi beban suatu UMKM yaitu beban pajak. Selain itu didukung dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.¹⁴

Selain itu terdapat perbedaan objek yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu jika pada penelitian terdahulu objek dari penelitiannya yaitu pada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diteliti oleh Yuwita Ariessa Pravasanti¹⁵ serta pada penelitian Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Saongko¹⁶ Namun pada penelitian kali ini objeknya berfokus pada pajak penghasilan (pph) pada UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan pernyataan di atas serta perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu. Maka selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak bagi sektor UMKM di Kota Semarang dengan menggunakan 4 variabel independen yaitu variabel tingkat pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan serta variabel kondisi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan terkait fenomena dan *gap research* pada penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas, maka hal inilah yang melatarbelakangi dan menjadikan permasalahan peneliti peneliti untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam hal ini yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan judul : **Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi**

¹⁴ Thalia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Medan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019.

¹⁵ Yuwita Ariessa Pravasanti, op.cit

¹⁶ Dian Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko, op.cit.

Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas. Maka dapat disimpulkan pertanyaan terkait rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah variabel kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan serta terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM di Kota Semarang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang dalam hal ini berhubungan dengan perilaku individu. TRA berkaitan dengan sikap dan norma subjektif, selanjutnya dikembangkan pada *Theory of planned behavior* dengan ditambahkan variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.¹⁷

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak yaitu sikap seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki.¹⁸ Theory ini niat manusia dalam berperilaku/melakukan tindakan akan dipengaruhi oleh 3 faktor indikator utama, yaitu: (1) *Attitude toward the behavior*/sikap terhadap suatu perilaku (behaviour belief). (2) Norma subyektif tentang suatu perilaku (normative belief). (3) *Perceived behavioral control*/Persepsi tentang kontrol perilaku (control belief), dalam theory ini dapat dikerjakan menggunakan 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Dalam penelitian Donna D Bobek and Richard C Hatfield¹⁹ menggunakan “pengukuran *Theory of planned behavior* secara tidak langsung, yaitu melalui keyakinan-keyakinan apa saja yang ada didalam masyarakat”. Sedangkan pada penelitian Francis, dkk²⁰ menyatakan bahwa variabel didalam *Theory of planned behavior* dapat diukur dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran secara langsung

¹⁷ Rachmawati Meita Oktaviani, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory", *JURNAL BISNIS DAN EKONOMI*, vol.22, no.1, (2015), 85–96.

¹⁸ Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, and Mutiara Maimunah, ‘Tax Compliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang’, *Junal InFestasi*, 13.2 (2017), 354–66.

¹⁹ Donna D Bobek and Richard C Hatfield, "An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance", *Behavioral Research in Accounting*, vol. 15 (2003).

²⁰ Francis and others, *Constructing Questionnaires Based On The Theory of Planned Behaviour: A Manual for Health Services Researcher*, Center for Health Services Research, 2004.

dilakukan dengan menanyakan kepada responden bagaimana keseluruhan sikap mereka terhadap suatu perilaku, tekanan dari orang-orang yang dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka didalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku”.²¹

Dalam *Theory of Planned Behavior* ini mengacu pada *compliance theory* (teori kepatuhan). Karna pada teori kepatuhan ini menerangkan terkait suatu kondisi dimana seseorang taat atau patuh pada peraturan yang ditetapkan atau diberikan.²² Teori kepatuhan ini berarti sikap patuh, taat, dan tunduk terhadap peraturan, ajaran atau hukum yang berlaku seperti contohnya pada kepatuhan terkait perpajakan yaitu kepatuhan wajib pajak akan tanggung jawab dan hak perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.²³

Peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* karena relevan pada perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak yang didasari oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai niat atau memiliki sikap baik terkait kepatuhan pajak, memiliki tekanan sosial dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku, dapat dinilai baik, dan memiliki kontrol dalam berperilaku untuk menilai suatu kondisi maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak dan dapat menimbulkan sikap yang patuh serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak.²⁴

²¹ Widi Hidayat and Argo Adhi Nugroho, "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, vol.12, no.2, (2010), 82–93.

²² Lisa Handke and Luisa Barthauer, 'The Psychology of Interpersonal Relations', 1958, 2019, 259–62 <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_59>.

²³ Ni Made Meisintia Indrayani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I Made Sudiartana, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Kharisma*, 4.2 (2022), 115–25.

²⁴ Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, vol.4, no.2, (2020), 603–15

2.2 Variabel Dependent

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan dalam hal ini terkait dengan perpajakan atau *tax compliance*, maksudnya situasi wajib pajak yang melakukan kewajibannya harus disiplin atau tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak, antara lain: (1) kemudahan memperoleh informasi melalui sistem perpajakan, (2) keberadaan peraturan perpajakan yang baik, (3) tarif pajak yang baik dan tidak memberatkan, (4) kemudahan proses pelaporan.

Apabila wajib pajak patuh jika membayar pajak serta memahami pentingnya pajak bagi negara Indonesia, maka akan meningkatkan pendapatan negara.²⁵ Arti kata patuh dalam hal ini bukan berarti wajib pajak membayar dengan melebihi nominal yang telah ditentukan, akan tetapi wajib pajak harus memahami serta mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan Islam kewajiban membayar pajak ini juga dimaksud dalam kewajiban lain atas harta selain zakat yang tercantum pada Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 177) yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kitab suci, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka orang-orang yang bertakwa".²⁶

²⁵ Rika Noviana, Afifudin, and Hariri, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang)", vol.09, no.04, (2020), 51–67.

²⁶ Tafsir, 'Surah Al-Baqarah Ayat 177', *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-117.html>>.

Dari ayat Al-Quran diatas, sejalan dengan tafsir yang yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir yang di dalam kitabnya ia menjelaskan bahwa hakikat sebenarnya yang dituju ialah taat kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Berikut ini penjelasnya mengenai tafsirnya:

وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجهه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه

Artinya: “*Terkait tafsir ayat ini, sehubungan Allah mulanya memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menghadap Baitul Maqdis kemudian memindahkannya ke Ka’bah, hal tersebut memberikan rasa susah kepada hati ahli kitab dan sebagian umat Islam. Allah menjelaskan hikmahnya, bahwa yang dimaksud dalam hal ini hanyalah untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah-Nya, menghadapkan ke arah manapun yang diperintah, dan mengikuti hal yang disyariatkan. Ini merupakan kebaikan, takwa, dan iman yang sempurna. Karena tidak ada kebaikan maupun ketaatan dengan menghadapkan ke timur dan barat jika bukan termasuk perintah dan syariat-Nya*”.²⁷

Maksud dari ayat dan tafsir diatas yaitu bahwa para wajib pajak harus taat atau patuh dengan kewajiban yang dimiliki yaitu dalam hal ini membayar pajak karena dengan dengan kita patuh membayar pajak dana yang dihimpun oleh pemerintah dari hasil pajak akan dapat mensejahterakan masyarakat atau negara ini.

2.3 Variabel Independent

2.3.1 Tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan akan berdampak pada sikap maupun sistem perpajakan yang adil. Jika wajib pajak semakin memahami ketentuan, ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam perpajakan maka akan berdampak pada pemikiran wajib pajak yang menimbulkan kesadaran

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur’anil Azhim, Riyadh, Dar Thayyibah Lin Nasyri Wa Tauzi’*.

betapa pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban wajib pajak.²⁸ Jika individu telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.²⁹

Apabila pemahaman perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.³⁰ Maksudnya apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang cukup mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Alasan mengapa peneliti menggunakan variabel independen tingkat pemahaman peraturan perpajakan untuk diangkat menjadi masalah penelitian karena apabila wajib pajak dalam hal ini para pelaku UMKM kurang memahami peraturan perpajakan maka akan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan membayar pajak khususnya pada sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya [21] ayat 78-79 yang berbunyi:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۗ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, mereka tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.³¹ Maka kami telah memberikan pengertian (pemahaman kepada) Sulaiman tentang hokum (yang lebih tepat). Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dari

²⁸ M. Hasan Ma’ruf and Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol.20, no.2, (2020), 276–84.

²⁹ N Adiasa, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Referensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*, 2013.

³⁰ Rizki Indrawan and Bani Binekas, "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, vol.6, no.3, (2018), 419–28.

³¹ Tafsir, ‘Surah Al-Anbiya Ayat 78’, *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/5590-surat-al-anbiya-ayat-78.html>>.

*ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya”.*³²

Sejalan dengan maksud Q.S Al-Anbiya ayat 78-79 diatas dijelaskan oleh tafsir al-jalalain oleh jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi yaitu berbunyi: “(Maka Kami telah memberikan pengertian tentang hukum) yakni keputusan yang adil dan tepat (kepada Sulaiman) keputusan yang dilakukan oleh keduanya itu berdasarkan ijtihad masing-masing, kemudian Nabi Daud mentarjihkan atau menguatkan keputusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa keputusan keduanya itu berdasarkan wahyu dari Allah dan keputusan yang kedua yaitu yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman berfungsi memansukh hukum yang pertama, yakni hukum Nabi Daud (dan kepada masing-masing) daripada keduanya (Kami berikan) kepadanya (hikmah) kenabian (dan ilmu) tentang masalah-masalah agama (dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud) demikianlah gunung-gunung dan burung-burung itu ditundukkan untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersamanya bila ia mengalami kelesuan, hingga ia menjadi semangat lagi dalam bertasbih. (Dan Kamilah yang melakukannya) yakni kamilah yang menundukkan keduanya dapat bertasbih bersama Daud, sekalipun hal ini menurut kalian merupakan hal yang ajaib dan aneh yaitu tunduk dan patuhnya gunung-gunung dan burung-burung kepada perintah Nabi Daud.”³³

Maksud dari ayat diatas kaitannya dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan yaitu kita harus bisa berfikir dan bisa memahami sesuatu dalam hal ini yaitu terkait dengan peraturan perpajakan karena pada dasarnya mausia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT diberi kelebihan berupa akal yang tentunya harus dipergunakan untuk berfikir ataupun memahami.

³² Tafsir, ‘Surah Al-Anbiya Ayat 79’, *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/5591-surat-al-anbiya-ayat-79.html>>.

³³ Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi, ‘Tafsir Jalalain’.

2.3.2 Tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2)

Pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³⁴ Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*.

Sering terjadinya kasus dalam perpajakan seperti contohnya penyalahgunaan oleh aparat pajak terkait pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Karena kasus tersebut masyarakat menjadi cemas atau khawatir dalam membayar pajak dan kondisi tersebut juga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, variabel ini relevan dijadikan masalah penelitian karena adanya masalah-masalah yang ada pada pemerintah yang menyebabkan para wajib pajak kurang mempercayai aparat pajak atau pemerintah dan akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 58 berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanamua, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat".³⁵

Menurut Ulama Imam Ar-Razi yaitu dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib berkaitan dengan maksud Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yaitu mengenai amanah, Imam Ar-Razi berpendapat bahwa amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian:

³⁴ T Permadi, A Nasir, and Y Anisma, "Studi Kemauan Membayar Pajak Pada WP OP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi*, vol.21, no.2, (2013), 1–18.

³⁵ Tafsir, 'Surah Al-Nisa Ayat 58', *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/1590-surat-al-nisa-ayat-58.html>>.

1. Pertama yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya. Lingkup bahasannya cukup luas sekali bagai lautan yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa segala amanat terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa.
2. Kedua, amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan para penguasa kepada rakyatnya ataupun keadilan seorang ulama' kepada jama'ahnya dengan cara tak memberatkan kepada mereka.
3. Ketiga, amanah terhadap diri manusia sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta tak mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan.³⁶

Maksud dari ayat dan tafsir diatas kaitannya dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum yaitu allah dan rasul memerintahkan kita untuk bersifat amanah atau dapat dipercaya artinya, aparat pemerintah ataupun aparat pajak harus amanah dalam mempergunakan dana pajak yang diberikan oleh wajib pajak dengan benar serta harus bersikap adil dalam menjalankan sesuatu, supaya para wajib pajak percaya terhadap aparat pemerintah dan tidak ada keraguan diantara mereka dan yang perlu kita pahami bahwa orang yang menunaikan amanah niscaya hidupnya menjadi berkah dan penuh hikmah.

2.3.3 Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan (e-system) harus dimanfaatkan wajib pajak khususnya pelaku UMKM untuk kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pembayaran pajak secara elektronik (online) memberikan kemudahan bagi wajib pajak, selain itu juga para pelaku UMKM dapat lebih lebih efektif dan efisien secara waktu dan

³⁶ Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi (Mafatih Al-Ghaib)* (Kairo: Dar el-hadith, 2012).

proses pembayaran maupun pelaporan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah.

Saat ini Direktorat Jendral Pajak di Indonesia melakukan banyak sekali perubahan sistem perpajakan yang mengarah kepada modernisasi sistem perpajakan, seperti sudah diterapkannya sistem pelaporan pajak secara elektronik, misalnya e-filling untuk pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Selain itu, pelaporan pajak berbasis web atau internet juga menjadi terobosan baru dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan begitu, modernisasi system administrasi perpajakan relevan untuk diangkat menjadi masalah penelitian karena dengan adanya inovasi serta pembaharuan akan dapat memudahkan para wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan seperti dalam membayar pajak. Ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang modernisasi sistem yaitu terdapat pada Q.S Al-Insyirah ayat 5-6) yang berbunyi:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (ayat 5)*”³⁷, *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (ayat 6)*”.³⁸

Selain itu terdapat pendapat para ulama yang berkaitan dengan surah Al-Insyirah ayat 5-6 diatas yaitu dari ulama Mamud Yunus dalam tafsir *Qur'an Karim* menjelaskan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, jika ditimpa suatu bala (cobaan, kesusahan), ia teringat akan firman Allah ini, yaitu; “disamping kesusahan ada kesenangan, disamping kesempitan ada kelapangan, sesudah bala menggoda, dibelakangnya nikmat berlipat ganda”. Sebab itu ia tidak boleh berduka cita atau berkeluh kesah benar atas cobaan Allah itu, karena ia mempunyai kepercayaan, bahwa Allah akan mengganti kesusahan itu dengan kesenangan, jika tidak hari ini, besok kemudian hari.³⁹

³⁷ Tafsir, ‘Surah Al-Insyirah Ayat 5’, *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/12837-surat-al-insyirah-ayat-5.html>>.

³⁸ Tafsir, ‘Surah Al-Insyirah Ayat 6’, *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/12838-surat-al-insyirah-ayat-6.html>>.

³⁹ Mahmud Yunus, *Studi Tafsir Qur'an Karim*, 1938.

Maksud dari ayat dan tafsir diatas kaitannya dengan modernisasi administrasi perpajakan yaitu jika dahulu para wajib pajak masih kesulitan dalam membayar pajak karena failitas yang kurang memadai, maka sekarang aparat pemerintah sudah mempermudah para wajib pajak dengan beberapa model pembayaran pajak yang lebih canggih dan dapat memudahkan para wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2.3.4 Kondisi ekonomi (X4)

Menurut Tommy Surya Effendi kondisi ekonomi merupakan pemanfaatan materi, tenaga, waktu, dan lainnya untuk perusahaan dalam kegiatan operasional atau tata kehidupan perekonomian. Kondisi ekonomi mencerminkan kemampuan keuangan suatu perusahaan yang terlihat dari arus kas dan tingkat profitabilitas.⁴⁰ Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi cenderung taat melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang sedang tidak baik akan menyebabkan perusahaan tersebut untuk memprioritaskan kebutuhan operasional perusahaan terlebih dahulu daripada kewajiban pajak. Dalam hal ini kegiatan UMKM terdapat pada ayat Al-Qur'an Q.S Al Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁴¹

Menurut pendapat para ulama terkait ayat Al-Qur'an Q.S Al Baqarah ayat 198 diatas yaitu contohnya tafsir dari Imam As-Suyuthi dalam kitab

⁴⁰ Tommy Surya Effendy and Agus Arianto Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai", *Tax & Accounting Review*, vol.1, no.1, (2013), 159.

⁴¹ Tafsir, 'Surah Al-Baqarah Ayat 198', *Tafsirweb.Com*, accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/721-surat-al-baqarah-ayat-198.html>>.

Ad-Durrul Mantsur meriwayatkan *Sababun nuzul* Al-Baqarah yang berbunyi:

أَخْرَجَ سُفْيَانُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذَرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سَنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ عَكَظٌ وَمَجْنَةٌ وَذُو الْمَجَازِ أُسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتَمُوا أَنْ يَتَجَرُوا فِي الْمَوْسِمِ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

Artinya: “*Sufyan, Said bin Mansur, Imam Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata: “Ukadz, Majanah dan Dzulmajaz merupakan nama-nama pasar pada masa jahiliyah, pada saat itu orang-orang merasa berdosa untuk berdagang pada musim pelaksanaan haji, mereka bertanya kepada Rasulullah Saw terkait hal tersebut. Kemudian turun ayat: “Laisa ‘alaikum junahun an tabtaghu fadhlam mir rabbikum” pada musim pelaksanaan haji’.*”⁴²

Kondisi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki wajib pajak. Apabila pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam menjalankan usahanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memungkinkan untuk membayar pajak maka tidak menutup kemungkinan para wajib pajak akan mudah dalam memenuhi kewajiban pajak yaitu membayar pajak, karena melihat dari finansial para wajib pajak yang sudah mencukupi untuk membayar pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teori	Alat Analisis	Hasil
1.	Nathania Aldisa Olivandiy, Titiek Puji Astuti, Faiz Rahman	Analisis Faktor yang mempengaruhi kepatuhan	Tarif pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2), persepsi atas efektifitas	Kepatuhan wajib pajak (Y)		Analisis regresi linear berganda	1. Variable tariff pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan tingkat kepercayaan

⁴² Imam As-Suyuthi, *Ad-Durrul Mantsur* (Beirut: Darul Fikri, 2011).

	Siddiq (2021)	han wajib pajak UMK M selama Pandemi Covid-19	system perpajakan (X3), tingkat kepercayaan pada system hokum dan pemerintahan (X4)				pada system hokum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sedangkan variable persepsi atas efektifitas system perpajakan memberi pengaruh negative pada kepatuhan wajib pajak
2.	Sri Wulandari, Astri Vitria (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Peran Konsultansi Pajak (X3)	Kepatuhan wajib pajak (Y)		Analisis regresi linear berganda	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Peran konsultansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Rinaldi Zentira Fikri, Mourisdagara, dindin hadi	Faktor - Faktor yang mempengaruhi	Kesadaran wajib pajak (X1), Pemahaman dan pengetahuan perpajakan	Kepatuhan wajib pajak (Y)			Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak berpengaruh

	saputra, Nasuhi (2020)	kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMK M	(X2), Sanksi pajak (X3)				positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Rimawati qadariah, Nur Diana, Junaidi (2021)	Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah norma subjektif kualitas terhadap kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan pemerintahan (X1), norma subjektif (X2), kualitas pelayanan (X3)	kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)		Regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Kepercayaan pemerintah, norma subjektif, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Hasil uji parameter individual menunjukkan bahwa Kepercayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

							4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, Riana Rachmawari Dewi (2018)	Pengaruh kesadaran pajak, system administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMK M di Surakarta	kesadaran pajak (X1), system administrasi pajak modern (X2), sanksi pajak (X3)	Kepatuhan wajib pajak (Y)		Analisis Reresi Berganda	kesadaran pajak, system administrasi pajak modern dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Nurma Risa, Mayta Rizky Puspita Sari (2021)	Pengaruh penerapan PP nomor 23 tahun 2018 dan modernisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan	Penerapan PP no. 23 tahun 2018 (X1), modernisasi perpajakan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			Penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP secara langsung serta Modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP secara langsung

		Wajib Pajak UMK M di Kota Bekasi					
7.	Oscar Ryanandi A, Endang Kusmana, Arianto (2020)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya	Penerapan E-Filling (X1), Persepsi Korupsi (X2), Lingkungan, Sanksi Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Theory cognitive dan theory compliance	Analisis Regresi Berganda	<p>2 Penerapan e-filling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3 Persepsi korupsi, lingkungan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP</p>
8.	Yuwita Ariesta Pravasanti (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Sosialisasi perpajakan (X1), pemahaman prosedur perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sanksi pajak (X4)	Kepatuhan wajib pajak (bumi dan bangunan) (Y)		Analisis regresi berganda	<p>1. Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB</p> <p>2. Pemahaman prosedur perpajakan dan kesadaran WP tidak berpengaruh secara signifikan</p>

							<p>terhadap kepatuhan WP untuk membayar PBB</p> <p>3. Sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran WP dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap WP dalam membayar PBB</p>
9.	Sriniyati (2020)	Pengaruh moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Moral pajak (X1), sanksi pajak (X2), kebijakan pengampunan pajak (X3)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Teori atribusi, teori kontrak pajak psikologis, dan teori keadilan	Analisis regresi berganda	<p>3 Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DIY</p> <p>4 Sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>5 Kebijakan Pengampunan pajak berpengaruh positif dan</p>

							signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10.	Listiyowat, In Indarti, Fitri Wijayanti, Freddy Aldo Setiawan (2021)	Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi Covid-19	Sosialisasi perpajakan (X1), pelayanan fiskus (X2), pelaksanaan self assessment system (X3)	Kepatuhan wajib pajak (UMKM di Kota Semarang) (Y)		Analisis linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang 2. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang 3. Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang 4. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan

							self assessment system secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang
11.	Herin Arlinda Yonita Sari, Makarya nawati, Ferby Mutia Edwy (2020)	Pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening	Sosialisai pajak (X1), realisasi penerimaan pajak (X2)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Theory of Planned	Analisis linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisai pajak berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak 3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak 4. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap realisasi penerima

							pajak melalui kepatuhan wajib pajak
12.	Agus Wahyudi (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem E-Filling (X1), Penerapan Sistem E-Billing (X2), Kebijakan Insentif Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)		Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Penerapan system E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3. Kebijakan Insentif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
13.	Rizky Pebriana, Amir Hidayatulloh (2020)	Pengaruh penerapan E-SPT, Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas	Penerapan E-SPT (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), kualitas pelayanan (X4)	Kepatuhan wajib pajak (Y)		Analisis regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 2. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

		s pelayan terhadap apa kepatuhan wajib pajak					3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
14.	Salman Latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta (2020)	Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan kepada pemerintah (X1), kebijakan insentif pajak (X2), manfaat pajak (X3)	kepatuhan wajib pajak (Y)		Analisis regresi berganda	Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makasar Selatan

2.5 Rumusan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus memahami dan mengetahui mengenai peraturan, undang-

undang serta tata cara mengenai membayar pajak, dan mengimplementasikan dalam seluruh kegiatan perpajakan.

Pemahaman perpajakan yang baik akan mempermudah dan membantu wajib pajak contohnya para pelaku UMKM dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan selaku wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Para wajib pajak harus terus melakukan peningkatan pemahaman perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan berkaitan dengan *behavioral belief* yaitu pada sikap individu yang akan mempengaruhi keinginan individu dalam melakukan sesuatu dan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pada teori ini pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh pada niat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq,⁴³ Sri Wulandari⁴⁴ dan Astri Fitria,⁴⁵ serta Rizaldi Zentira Fikri, dkk⁴⁶ yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁷ Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Ada pengaruh positif tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

⁴³ Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq, op.cit

⁴⁴ Sri Wulandari dan Astri Fitria, op.cit

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Rinaldi Zentira Fikri

⁴⁷ Ibid

2.5.2 Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tingkat kepercayaan pada pemerintah yang berlaku dapat berkontribusi pada keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Apabila wajib pajak mempercayai system pemerintahan dan hukum yang tegas dalam pelaksanaan semua peraturan yang berlaku,⁴⁸ maka pelaksanaan fungsi pemerintah dan hukum yang baik dapat membuat penilaian positif para wajib pajak kepada aparat pajak sehingga para pelaku UMKM dalam hal ini sebagai wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya.

Saat ini masih sering terjadi kasus mengenai penyalahgunaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dikorupsi oleh para aparat pemerintah maupun aparat pajak sehingga hal tersebut membuat wajib pajak meembentuk niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Oleh sebab itu pra wajib pajak dalam hal ini para pelaku UMKM masih enggan untuk membayar pajak karena mereka takut pajak yang sudah dibayarkan akan disalahgunakan oleh para aparat pemerintah maupun aparat pajak. Selain itu juga terdapat kasus mengenai para aparat pajak yang tidak melaporkan besaran harta sesuai yang dimiliki yang menjadikan hal itu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengangkap mereka dituntut untuk melaporkan harta kepemilikannya dengan benar akan tetapi para aparat pemerintah tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, kepercayaan kepada pemerintah akan muncul apabila terdapat niat dari wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kepercayaan terhadap suatu perilaku, apabila para wajib pajak dihadapkan pada suatu kejadian perilaku maka akan sedikit dari kepercayaan itu akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Pada theory ini juga sesuai dengan pikiran yang rasional. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum dapat menjadikan pertimbangan bagi para wajib pajak dalam

⁴⁸ Salman Latief, Junaidin Zakaria, and Mapparenta, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Center of Economic Student Journal*, vol.3, no.3, (2020), 271-89.

membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya. Artinya wajib pajak pastinya mengharapkan para pemerintah mengelola pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathania Aldisa Olivandy, dkk⁴⁹ serta Rimawati Qadariah, dkk⁵⁰ menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Ada pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.3 Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu penyempurnaan mengenai kinerja administrasi supaya lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Sistem administrasi yang baik dan efektif akan berdampak pada penerimaan pajak yang sesuai dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan para wajib pajak bisa lebih patuh membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena sudah difasilitasi dengan digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour* modernisasi perpajakan ini berkaitan dengan system pajak yang dapat membantu para wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan atau dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. System administrasi perpajakan yang sulit, tidak efisien, tidak efektif akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Pada theory ini juga menjelaskan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan terdapat perilaku yang diperlihatkan para individu

⁴⁹ Nathania Aldisa Olivandy, Titi Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq, op.cit

⁵⁰ Rimawati Qadariah, Nur Daiana, and Junaidi, op.cit.

karena adanya niat untuk berperilaku, untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari⁵¹ menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Ada pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.4 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi para UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dalam hal ini para pelaku UMKM apabila mendapatkan omset atau laba yang memenuhi kriteria dalam tarif pph final akan patuh dalam membayar pajak. Artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak, maka kemungkinan akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan *theory of planned behavior* ini berkaitan kontrol perilaku yaitu pada tingkat ekonomi dan pendapatan dalam hal ini para pelaku UMKM. Kontrol perilaku dapat diukur dengan tingkat ekonomi dan pendapatan hal ini berkaitan dengan apakah para pelaku UMKM dapat mengontrol dirinya untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thalia⁵² menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kondisi ekonomi dan pendapatan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

⁵¹ Nurma Risa and Mayta Rizky Puspita Sari, op.cit.

⁵² Thalia, op.cit

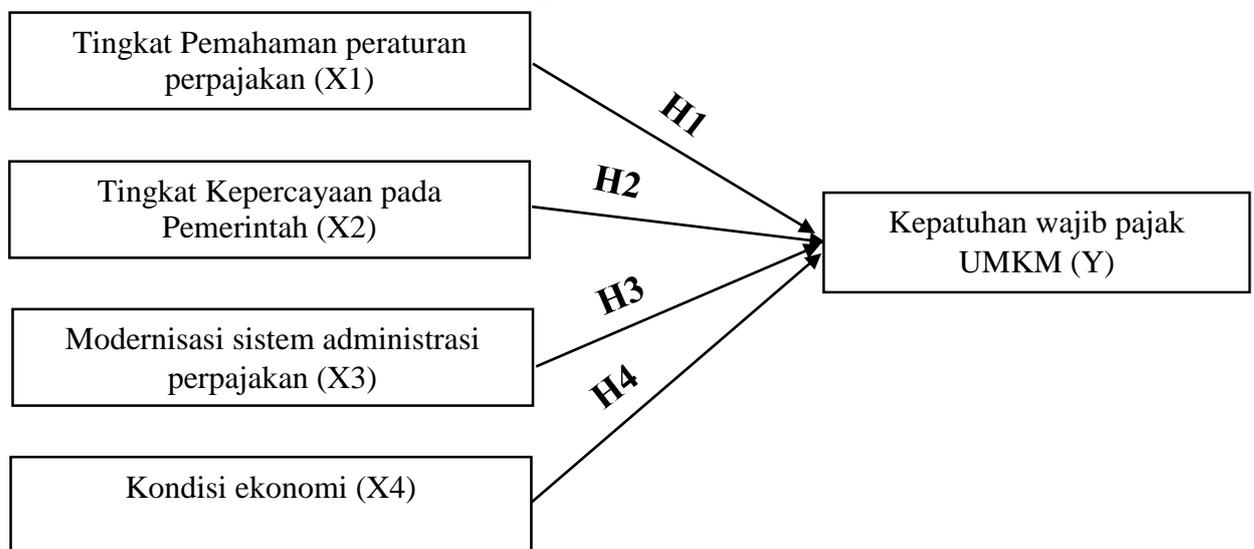
membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Ada pengaruh positif kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.6 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir penelitian ini mengenai factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang dimana pada penelitian ini terdapat 4 faktor yang disebut variabel independent, yaitu: tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X1), tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), kondisi ekonomi dan pendapatan (X4). Variabel dependent penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), untuk itu variabel dependent dan independen digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dimana didalamnya menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak hanya memfokuskan pada kedalaman data namun dalam penelitian ini juga dilakukan pengambilan data sebanyak-banyaknya dari populasi dan diolah atau dianalisis dengan mudah melalui rumus statistik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.⁵³

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependent.⁵⁴ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan, meringkas berbagai kondisi dan situasi, dan berbagai variabel yang dipilih oleh peneliti yang timbul dari objek penelitian.⁵⁵

3.2 Sumber Penelitian

3.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti.⁵⁶

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik

⁵³ Asrianti, "Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan) Skripsi, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018, 1–150.

⁵⁴ Bayu Witono, "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, vol.7, no.2, (2008), 196–208.

⁵⁵ Eko Yudi Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib [Ajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar)", *Jurnal of Accounting Unpad*, vol.5, no.2, (2018), 45–60.

⁵⁶ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam", *Journal of Accounting and Management Innovation*, vol.1, no.2, (2017), 119–28.

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kota Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.⁵⁷ Selain itu sumber data primer ini juga dapat dilakukan dengan proses wawancara.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari tangan kedua yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasi) untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dari arsip. Selain itu data sekunder ini juga bisa berupa studi kepustakaan (Library research) yang bersumber dari buku, maupun jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website, penelitian terdahulu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang, serta Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah I untuk mengetahui presentasi tingkat kepatuhan di Kota Semarang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang dengan kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.⁵⁸ Tujuan diadakannya populasi supaya peneliti dapat menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi dan memberikan batasan berlakunya daerah generalisasi.⁵⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Semarang yang melakukan kewajiban

⁵⁷ Riano Roy Purnaditya, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari)", Skripsi, *Universitas Diponegoro*, 2015.

⁵⁸ NUR Indiantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*, I (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013)

⁵⁹ Dea aulya Sari sasi gendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022.

perpajakan seperti membayar pajak. Guna efisiensi waktu, biaya, tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.⁶⁰ Pengertian lain mengenai sampel yaitu bagian atau subyek yang mewakili sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Non-Probability Sampling* yang dimana dalam teknik ini tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan metode *convenience sampling*, mengapa peneliti menggunakan metode pengambilan sampel ini karena pada pengambilan sampel ini dirasa mudah bagi peneliti dimana teknik penentuan sampel ini didasarkan pada kebetulan saja anggota populasi yang ditemui oleh peneliti dan mau untuk dijadikan sebagai responden serta dianggap dapat memberikan informasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah secara acak dengan memberikan peluang yang sama terhadap semua wajib pajak dalam hal ini yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Semarang. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan rumus slovin sebagai berikut:⁶¹

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan

⁶⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁶¹ Siregar Syofiyon, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Semarang per bulan Maret tahun 2023 terdapat 33.294 wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang digolongkan berdasarkan objek pajak seperti pajak olahan makanan, kerajinan, pariwisata, dan logam. Maka dari jumlah sampel pada penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{33.294}{1 + 33.294(10\%)^2}$$

n = 97.70 dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuisisioner

Penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitiannya menggunakan cara kuisisioner (angket). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶²

Prosedur metode kuisisioner adalah peneliti akan memberikan sejumlah pernyataan kepada wajib pajak UMKM di Kota Semarang dengan menggunakan media kuisisioner (angket) dan wajib pajak tersebut diminta untuk menjawab pernyataan – pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat mereka.⁶³

Data yang diperoleh berupa jawaban responden dalam bentuk kuisisioner yang berisi pertanyaan tentang pemahaman perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi para wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet-10 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

⁶³ Rifandhi Nur Akbar, "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)", *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*, vol1, no.1, (2015), 1–25.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi yaitu mulai angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Kategori Sangat Rendah

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Kategori Rendah

Angka 3 = Netral (N) Kategori Sedang

Angka 4 = Setuju (S) Kategori Tinggi

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) Kategori Sangat Tinggi

3.4.2 Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data dengan mengambil gambar atau melakukan pengamatan data tertentu terkait informasi yang akan diperoleh untuk nantinya dapat disalin dan digunakan dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi pada saat kegiatan penyebaran atau pengisian secara langsung kepada para pelaku UMKM.

3.5 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel independen/bebas (X) dan variabel dependen/terikat (Y). Pada variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak sedangkan pada variabel independen berupa tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X1), tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), dan kondisi ekonomi (X4).

Untuk mengungkap variabel penelitian serta untuk memberikan pemetaan yang komperhensif terhadap hubungan antar variabel, maka berikut

ini disajikan definisi operasional variable disertakan dengan indikator pengukurannya.⁶⁴

3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak harus taat atau patuh melaksanakan kewajibannya seperti membayar pajak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

3.5.2 Tingkat Pemahaman peraturan perpajakan (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan ini merupakan hal terpenting bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Karena dengan ini kita bisa mengetahui seberapa paham wajib pajak memahami terkait sistem, ketentuan, ataupun sanksi dalam perpajakan.

3.5.3 Tingkat Kepercayaan pada pemerintah (X2)

Dalam variabel ini apabila aparat pemerintah melaksanakan tugas dengan baik maka akan memberikan nilai positif untuk wajib pajak dan para wajib pajak akan percaya pada aparat pemerintah dan hukum sehingga akan membuat wajib pajak untuk dapat terus memenuhi kewajiban pajaknya yaitu membayar pajak.

3.5.4 Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)

Maksud dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yaitu adanya perubahan administrasi yang mengikuti teknologi saat saat ini kaitannya dengan proses administrasi perpajakan. Seperti contoh pada era digital ini para wajib pajak dapat mengisi SPT pajak secara online yaitu dengan menggunakan e-filing.

3.5.5 Kondisi ekonomi (X4)

Kondisi ekonomi menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak yang akan berpengaruh pada kewajiban wajib

⁶⁴ Restu mutmainnah Marjan, "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*", Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.

pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini apabila kondisi keuangan sedang tidak baik maka akan suatu usaha akan memprioritaskan terlebih dahulu operasional usahanya daripada membayar pajak.

Tabel 3.1
Variabel dan Pengukuran Indikator

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Dahrani dkk, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk bersikap patuh, taat, dan tunduk serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. ⁶⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban memiliki NPWP 2. Tepat waktu/patuh dalam membayar pajak dan sesuai terutang 3. Tepat waktu/patuh dalam melaporkan SPT 4. Pelaporan SPT dengan benar, lengkap dan jelas 5. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 6. Tidak mempunyai tunggakan pajak 	Skala Likert
2.	Tingkat Pemahaman peraturan perpajakan (X1)	Menurut Alwi Rinda Sari, dkk Tingkat pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek penting bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau dapat dikatakan proses memahami atau mengerti segala hal terkait peraturan perpajakan dengan benar. ⁶⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai ketentuan umum atau peraturan perpajakan 2. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tariff pajak 3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan 4. Pemahaman mengenai sistem perpajakan 	Skala Guttman

⁶⁵ Dahrani Dahrani and others, "Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan)", *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol.21, no.02, (2021), 379–89.

⁶⁶ Alwi Raninda Sari and Dewi Rejeki, "Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat)", *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, vol.22, no.2 (2021).

			(menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri SPT) 5. Pemahaman mengenai kepemilikan NPPWP bagi Wajib pajak yang berpenghasilan	
3.	Tingkat Kepercayaan pada pemerintah (X2)	Menurut Nik Amah, dkk Tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu factor sosiologis individu yang terbentuk untuk menentukan patuh atau tidaknya para wajib pajak, jika wajib pajak percaya pada otoritas/pemerintah maka mereka akan mematuhi peraturan pemerintah yang berhubungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sikap ini dapat dilihat dalam bagaimana program pemerintah dalam mengedepankan kepentingan rakyatnya. ⁶⁷	1. Kepercayaan pada sistem pemerintah 2. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali kepada rakyat dan pembangunan 3. Kepercayaan pada lembaga peradilan 4. Kepercayaan pada hukum yang ditetapkan 5. Kepercayaan pada fiskus (pemungut pajak)	Skala Likert
4.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)	Menurut Vinska Kiki Anggraeni, dkk modernisasi system administrasi perpajakan merupakan system administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efektif dan efisien serta memudahkan para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan	1. Mudah dalam pelaporan, pengisian SPT, pembayaran pajak secara online. 2. Lebih cepat memperoleh informasi peraturan perpajakan 3. Lebih hemat 4. Tidak merepotkan 5. Perhitungan lebih cepat 6. Lebih efisien	Skala Likert

⁶⁷ Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari, "Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ekonomi*, vol.28, no.1, (2023), 1–19.

		teknologi informasi yang lebih modern. ⁶⁸		
5.	Kondisi ekonomi (X4)	Menurut Lutfah Fadilah kondisi ekonomi UMKM itu salah satu faktor ekonomi yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Masyarakat kelas bawah akan kesulitan untuk membayar pajak dikarenakan factor ekonomi yang kurang memadai, mayoritas dari mereka lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu dibandingkan membayar pajak. Kondisi ekonomi ini setara dengan tingkat pendapatan yang diperoleh UMKM dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut mempunyai kesadaran dan kepatuhan akan kewajibannya. ⁶⁹	1. Kondisi ekonomi yang mengalami fluktuasi maupun penurunan 2. Pengeluaran usaha yang besar 3. Pendapatan usaha yang tidak menentu dan sedikit 4. Persaingan harga produsen	Skala Likert

Tabel 3.2
Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert

Pertanyaan		Skor Pertanyaan	
		Presentase	Nilai
Sangat Setuju	SS	100%	5
Setuju	S	75%	4
Netral	N	50%	3

⁶⁸ Vinska Kiki Anggraeni and Tirza Oktovianti Lenggono, "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm", *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, vol.9, no.1, (2021), 96–108.

⁶⁹ Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng Noermansyah, and Krisdiyawati Krisdiyawati, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19", *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, vol.5, no.2 (2021), 450–59.

Tidak setuju	TS	25%	2
Sangat tidak setuju	STS	0%	1

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti, selain itu dalam uji ini juga mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *product moment* yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{[n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

R_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

n = Jumlah responden

$\sum x \cdot y$ = Jumlah hasil kali skor x dan y setiap responden

$\sum x$ = Jumlah skor x

$\sum y$ = Jumlah skor y

$(\sum x)^2$ = Kuadrat jumlah skor x

$(\sum y)^2$ = Kuadrat jumlah skor y

Kriteria penilaian instrumen dikatakan valid apabila r_{xy} lebih besar dari pada r_{tabel} , dan sebaliknya apabila r_{xy} lebih kecil dari pada r_{tabel} maka instrumen dikatakan tidak valid.⁷⁰

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan instrument penelitian untuk mengukur tingkat konsistensi responden dalam menjawab kuisisioner. Pada uji reliabilitas ini biasanya dilihat menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* yang dimana nilai dari *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,60 dengan uji signifikansi 0,05 sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan.⁷¹

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut yaitu yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen yang dimana seharusnya model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai Tolerance melalui program SPSS. Apabila terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 , jika tidak terjadi multikolinieritas apabila VIF < 10 .

3.8.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji ini dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai profitabilitasnya $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

⁷⁰ Muhammad Dimas Adi, "Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)", Skripsi, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

⁷¹ Sugiyono.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression analysis), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁷²

$$\text{KWP} = a + \beta_1 \cdot \text{TPPP} + \beta_2 \cdot \text{TKP} + \beta_3 \cdot \text{MSAP} + \beta_4 \cdot \text{KE} + e$$

Keterangan:

KWP: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a: Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_2 : Koefisien Regresi Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

β_3 : Koefisien Regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

β_4 : Koefisien Regresi Kondisi Ekonomi

TPPP: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

TKP: Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

MSAP: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

KE: Kondisi Ekonomi

e: error term

⁷² Ridyaning Dian Pramesti, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)", Skripsi, *Universitas Muhamadiyah Surakarta*, 2018.

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.10.2 Uji statistik F

Uji F ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama pada variabel dependen. Dalam uji F ini terdapat 2 ketentuan antara lain:

- Jika hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi $F < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ada pengaruh antara variable independen dengan variable dependen secara bersamaan. Artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika analisis signifikansi $F > 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersamaan. Artinya H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.10.3 Uji Statistik T

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variable dependen pada persamaan regresi. Dalam pengujian ini perlu memperhatikan bersaan nilai r dan nilai signifikansi. Dalam uji t terdapat 2 ketentuan antara lain:

- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi $t < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh antara variabel dependen dengan independen. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima

- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi $t > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian skripsi ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Konsisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang). Dalam penelitian ini terdapat variabel X yang merupakan salah satu faktor dan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang yang berjumlah 4 variabel X antara lain: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3), dan Kondisi Ekonomi (X4). Dalam penelitian ini juga terdapat variabel Y yang berupa Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Di Indonesia terdapat 38 provinsi salah satunya yaitu Jawa Tengah. Terdapat beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah contohnya Kota Semarang. Kota Semarang berdiri pada tanggal 2 Mei 1947, Kota Semarang ini juga merupakan pusat Kota Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengingat Kota ini adalah Ibu Kota dari Jawa tengah. Kota Semarang ini juga merupakan kota metropolitan karena padatnya penduduk yang ada di kota ini kurang lebih sebanyak 1,7 juta sampai 2 juta jiwa, dan pada kota ini juga terdapat gedung-gedung tinggi yang terdapat di sepanjang jalan kota. Kota Semarang juga merupakan salah satu kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

4.1.2 Topografi Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang ini yaitu 372,7 km² dengan posisi geografis yaitu 6^o50’-7^o10’ lintang selatan dan 109^o35’-110^o50’ bujur timur yang dimana terdapat batasan-batasan Laut dan Kabupaten lain

seperti Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota Semarang ini berkembang pesat yang ditandai dengan didominasi pada sektor perdagangan dan jasa karena PDRB tertinggi yaitu terdapat pada sektor perdagangan dan industri. Kawasan perdagangan pada Kota Semarang ini terdapat pada kawasan simpanglima maupun kawasan perdagangan di sepanjang jalan Pandanaran yang dimana di sepanjang jalan tersebut terdapat banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual berbagai macam oleh-oleh yang sampai sekarang jalan tersebut terkenal dengan pusat oleh-oleh khas Semarang

4.1.3 Gambaran Umum UMKM Kota Semarang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu jenis usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan salah satu usaha yang dimiliki perorangan atau individu yang memiliki keuntungan dari hasil penjualan maksimal sebesar Rp 300.000.000 setiap tahunnya dan kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000. Usaha Kecil merupakan salah satu usaha yang dimiliki perorangan atau individu yang memiliki keuntungan dari hasil penjualan maksimal sebesar Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000 setiap tahunnya dan kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000. Usaha Menengah merupakan salah satu usaha yang memiliki keuntungan dari hasil penjualan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000 setiap tahunnya dan kekayaan bersih mencapai diatas Rp 500.000.000 yang tidak termasuk bangunan seperti tanah dan tempat usaha.

Kota Semarang mempunyai banyak penduduk yang mempunyai UMKM. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang per bulan Maret tahun 2023 terdapat 33.294 UMKM yang tersebar luas di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Angka tersebut menunjukkan banyaknya UMKM yang ada di Kota Semarang dan

diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini peneliti mengumpulkan sebanyak 100 sampel yang disebar ke berbagai para wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang. Pengambilan sampel ini didasarkan pada rumus slovin dari populasi yang diperoleh oleh peneliti. Kuisisioner ini disebar secara langsung dan juga melalui google form dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Selanjutnya data kuisisioner yang diperoleh dari responden diolah menggunakan SPSS untuk dilakukan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, dan uji regresi.

Data yang diperoleh dari responden pada penelitian ini yaitu berupa nama responden, alamat responden, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, penjelasan memiliki npwp atau tidak, nama atau jenis UMKM, omset atau pendapatan per tahun, dan kriteria UMKM.

Tabel 4.1
Distribusi Sampel

Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar secara langsung	80	80%
Kuisisioner yang disebar dengan google form	20	20%
Total kuisisioner yang disebar	105	105%
Kuisisioner yang tidak digunakan/tidak dapat diolah	5	5%
Kuisisioner yang digunakan/ dapat di olah	100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menjelaskan bahwa kuisisioner yang disebar ke responden sebanyak 105 kuisisioner, akan tetapi kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden yang berasal dari 80 responden yang didapatkan secara langsung dan 20 responden yang di dapatkan melalui

google form. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diolah menggunakan aplikasi SPSS 25.

4.2.2 Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa penentuan klasifikasi, antara lain: klasifikasi jenis kelamin, klasifikasi pendidikan terakhir, klasifikasi kepemilikan NPWP, klasifikasi kriteria UMKM.

Tabel 4.2

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	56	56%
2.	Perempuan	44	44%
Total		100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 responden dengan presentase 56% dan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 responden dengan presentasi 44%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	SD	10	10%
2.	SMP	17	17%
3.	SMA	25	25%
4.	Diploma	20	20%
5.	S1/Sarjana	25	25%
6.	S2/Magister	3	3%
Total		100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 10 responden dengan presentase 10%, responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 17 responden dengan presentase 17%, responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 25 responden dengan presentase 25%, responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 20 responden dengan presentase 20%, responden yang berpendidikan terakhir S1/Sarjana sebanyak 25 responden dengan presentase 25%, responden yang berpendidikan terakhir S2/Magister sebanyak 3 responden dengan presentase 3%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berpendidikan terakhir yaitu SMA dan S1/Sarjana.

Tabel 4.4

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Alamat

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	Banyumanik	1	1%
2.	Candisari	1	1%
3.	Gajahmungkur	1	1%
4.	Gayamsari	2	2%
5.	Genuk	2	2%
6.	Gunungpati	2	2%
7.	Mijen	5	5%
8.	Ngaliyan	14	14%
9.	Pedurungan	1	1%
10.	Semarang Barat	8	8%
11.	Semarang Selatan	3	3%
12.	Semarang Tengah	12	12%
13.	Semarang Timur	2	2%
14.	Semarang Utara	11	11%
15.	Tembalang	28	28%
16.	Tugu	7	7%
Total		100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas memperoleh hasil bahwa terdapat 1 responden yang berasal dari Kecamatan Banyumanik dengan presentase 1%, 1 responden berasal dari Kecamatan Candisari dengan presentase 1%, 1 responden berasal dari Kecamatan Gajahmungkur dengan presentase 1%, 2 responden berasal dari Kecamatan Gayamsari dengan presentase 2%, 2 responden berasal dari kecamatan genuk dengan presentase 2%, 2 responden berasal dari Kecamatan Gunungpati dengan presentase 2%, 5 responden berasal dari Kecamatan Mijen dengan presentase 5%, 14 responden berasal dari Kecamatan Ngaliyan dengan presentase 14%, 1 responden berasal dari kecamatan pedurungan dengan presentase 1%, 8 responden berasal dari Kecamatan Semarang Barat dengan presentase 8%, 3 responden berasal dari Kecamatan Semarang Selatan dengan presentase 3%, 12 responden berasal dari kecamatan Semarang Tengah dengan presentase 12%, 2 responden berasal dari kecamatan Semarang Timur dengan presentase 2%, %, 11 responden berasal dari Kecamatan Semarang Utara dengan presentase 11%, 28 responden yang berasal dari Kecamatan Tembalang dengan presentase 28%, 7 responden berasal dari Kecamatan Tugu dengan presentase 7%.

Untuk itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha (UMKM) berasal dari Kecamatan Tembalang.

Tabel 4.5

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis UMKM

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	UMKM Jasa	20	20%
2.	UMKM Dagang	80	80%
Total		100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas memperoleh hasil bahwa terdapat 20 responden yang mempunyai usaha di bidang jasa dengan presentase 20%,

dan 80 responden yang mempunyai usaha di bidang dagang dengan presentase 80%. Untuk itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas mempunyai usaha yang bergerak di bidang dagang yaitu sebanyak 80 responden dengan presentase 80%. Hal tersebut yang menjadikan Kota Semarang banyak sekali kawasan perdagangan di sepanjang jalan.

Tabel 4.6

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Kriteria UMKM

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	UMKM Mikro	90	90%
2.	UMKM Kecil	5	5%
3.	UMKM Menengah	5	5%
Total		100	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang tergolong usaha mikro (kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000) 90 responden dengan presentase 90%, responden yang tergolong usaha kecil (kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 – Rp 50.000.000) sebanyak 5 responden dengan presentase 5%, responden yang tergolong usaha menengah (kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000) sebanyak 5 responden dengan presentasi 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas responden tergolong usaha mikro dengan kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Pada bagian ini deskripsi variabel yaitu terkait penjelasan mengenai variabel yang digunakan peneliti untuk mengetahui jawaban dari kuisioner setiap variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel dependen berupa tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi. Serta 1 variabel independen berupa kepatuhan wajib pajak. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana

responden paham atau mengerti mengenai variabel-variabel tersebut untuk dijadikan acuan jawaban dari responden pada setiap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyebaran kuisisioner sebanyak 100 kuisisioner yang disebar ke berbagai wilayah Kota Semarang dengan objek para UMKM. Dalam kuisisioner tersebut terdapat asumsi penilaian dalam pengukuran kuisisioner tersebut berupa:

1. Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Kategori Sangat Rendah
2. Nilai 2 = Tidak Setuju (TS) Kategori Rendah
3. Nilai 3 = Netral (N) Kategori Sedang
4. Nilai 4 = Setuju (S) Kategori Tinggi
5. Nilai 5 = Sangat Setuju (SS) Kategori Sangat Tinggi

Kategori asumsi penilaian di atas diperoleh dari rumus interval yaitu:

$$rs = \frac{m-n}{k}$$

$$rs = \frac{5-1}{5}$$

$$rs = 0,8$$

Keterangan:

rs : rentang skala

m : skor minimal

n : skor maksimal

k : jumlah kategori

Tabel 4.7
Kategori Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval	Interval
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$	$0 \leq x \leq 2$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$	$3 \leq x \leq 4$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$	$5 \leq x \leq 7$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$	$8 \leq x \leq 9$

Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$	10
---------------	---------------------	----

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

4.3.1 Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan ini terdiri dari 10 butir indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan:

Tabel 4.8

Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

No	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban		Jumlah Presentase
		Jawaban Salah	Jawaban Benar	
1.	X1.1	6	94	100%
2.	X1.2	11	89	100%
3.	X1.3	21	79	100%
4.	X1.4	13	87	100%
5.	X1.5	11	89	100%
6.	X1.6	12	88	100%
7.	X1.7	11	89	100%
8.	X1.8	10	90	100%
9.	X1.9	13	87	100%
10.	X1.10	11	89	100%
Total Rata-Rata Jawaban		11,9	88,1	100%

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Tabel 4.9

**Hasil Statistik Deskripsi Total Rata –Rata Tingkat Pemahaman
Peraturan Perpajakan (X1)**

Statistics		
Total		
N	Valid	100
	Missing	0
Mean		8.81
Std. Error of Mean		.095
Median		9.00
Mode		9
Std. Deviation		.950
Variance		.903
Range		3
Minimum		7
Maximum		10
Sum		881

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 di atas memperoleh hasil bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa terdapat 11,9% Responden yang menjawab soal salah dan 88,1% responden yang menjawab soal dengan benar dengan total rata-rata jawaban dari 10 butir pertanyaan tersebut sebesar 8,81 yang dimana angka tersebut menunjukkan kategori “tinggi”.

Berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas responden memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.2 Deskripsi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)

Variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah ini terdiri dari 6 butir indikator pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah:

Tabel 4.10
Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Kepercayaan Pada
Pemerintah (X2)

No.	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	0	3	11	52	34	100%	4,17
2.	X1.2	0	0	12	49	39	100%	4,27
3.	X1.3	0	0	16	47	37	100%	4,21
4.	X1.4	0	1	8	54	37	100%	4,27
5.	X1.5	0	0	6	52	42	100%	4,36
6.	X1.6	1	1	12	51	35	100%	4,18
Total Rata-Rata		0,17	0,83	10,83	50,84	37,33	100	4,24

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas memperoleh hasil bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum menunjukkan bahwa terdapat 0,17% Responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS), 0,83% responden menjawab tidak setuju (TS), 10,83% responden yang menjawab netral (N), 50,84% responden yang menjawab setuju (S), 37,33% responden yang menjawab setuju (SS) dengan total rata-rata jawaban dari 6 butir pertanyaan tersebut sebesar 4,24 yang dimana angka tersebut menunjukkan kategori “sangat tinggi”.

Berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas responden memiliki kepercayaan pada pemerintah yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.3 Deskripsi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ini terdiri dari 8 butir indikator pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan

analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan:

Tabel 4.11

**Hasil Statistik Deskripsi Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan (X3)**

No.	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata- rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	0	0	7	51	42	100%	4,35
2.	X1.2	0	0	14	50	36	100%	4,22
3.	X1.3	0	0	10	54	36	100%	4,26
4.	X1.4	0	0	16	56	28	100%	4,12
5.	X1.5	0	3	16	48	33	100%	4,11
6.	X1.6	0	0	23	46	31	100%	4,08
7.	X1.7	0	0	11	53	36	100%	4,25
8.	X1.8	0	2	9	50	39	100%	4,26
Total Rata-Rata		0	0,62	13,25	51	35,13	100	4,2

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas memperoleh hasil bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan bahwa terdapat 0,62% Responden yang menjawab tidak setuju (TS), 13,25% responden yang menjawab netral (N), 51% responden yang menjawab setuju (S), 35,13% responden yang menjawab setuju (SS) dengan total rata-rata jawaban dari 8 butir pertanyaan tersebut sebesar 4,2 yang dimana angka tersebut menunjukkan kategori “sangat tinggi”.

Berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas responden beranggapan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.4 Deskripsi Kondisi Ekonomi (X4)

Variabel Kondisi Ekonomi ini terdiri dari 4 butir indikator pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel kondisi ekonomi

Tabel 4.12

Hasil Statistik Deskripsi Kondisi Ekonomi (X4)

No.	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	0	1	0	33	66	100%	4,64
2.	X1.2	0	2	0	41	57	100%	4,53
3.	X1.3	1	13	0	59	27	100%	3,98
4.	X1.4	0	8	0	61	31	100%	4,15
Total Rata-Rata		0,25	6	0	48,5	45,25	100	4,33

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas memperoleh hasil bahwa variabel Kondisi Ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 0,25% responden menjawab sangat tidak setuju (STS), 6% Responden yang menjawab tidak setuju (TS), 48,5% responden yang menjawab setuju (S), 45,25% responden yang menjawab setuju (SS) dengan total rata-rata jawaban dari 4 butir pertanyaan tersebut sebesar 4,33 yang dimana angka tersebut menunjukkan kategori “sangat tinggi”.

Berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas responden memiliki kondisi ekonomi yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.5 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ini terdiri dari 6 butir indikator pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.13

Hasil Statistik Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	0	0	10	53	37	100%	4,27
2.	X1.2	0	1	7	52	40	100%	4,31
3.	X1.3	0	0	2	50	48	100%	4,46
4.	X1.4	0	0	2	43	55	100%	4,53
5.	X1.5	0	0	11	48	41	100%	4,30
6.	X1.6	0	0	10	45	45	100%	4,35
Total Rata-Rata		0	0,17	7	48,5	44,33	100	4,37

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas memperoleh hasil bahwa variabel kondisi ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 0,17% Responden yang menjawab tidak setuju (TS), 7% responden yang menjawab netral (N), 48,5% responden yang menjawab setuju (S), 44,33% responden yang menjawab setuju (SS) dengan total rata-rata jawaban dari 6 butir pertanyaan tersebut sebesar 4,37 yang dimana angka tersebut menunjukkan kategori “sangat tinggi”.

Berdasarkan kategori tersebut maka hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang sudah tinggi dan hal tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada teknik analisis statistic deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai rata-rata (*mean*), median, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum pada setiap variabel dependen berupa tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X1), tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), dan konsidi ekonomi (X4) serta variabel independen berupa kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 4.14
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah responden	Mean	Median	Std. Deviation	Variance	Max	Min
X1	100	8,81	9,00	0,950	0,903	10	7
X2	100	25,46	24,00	2,904	8,433	30	20
X3	100	33,65	32,00	4,120	16,977	40	27
X4	100	17,30	18,00	2,213	4,899	20	11
Y	100	26,22	26,00	2,823	7,971	30	20

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dengan 100 responden menjelaskan bahwa *mean*, *median*, std. deviation, *variance*, nilai maximum dan minumin sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

Hasil analisis statistik deskripsi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,81, *median* sebesar 9,00, standar deviasi sebesar 0,950, *variance* sebesar 0,903 dengan nilaim maksimum sebesar 10 dan nilai minimum sebesar 7.

2. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Hasil analisis statistik deskripsi variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,46, *median* sebesar 24,00, standar deviasi sebesar 2,904, variance sebesar 8,433 dengan nilai maksimum sebesar 30 dan nilai minimum sebesar 20.

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil analisis statistik deskripsi modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33,65, *median* sebesar 32,00, standar deviasi sebesar 4,120, variance sebesar 16,977 dengan nilai maksimum sebesar 40 dan nilai minimum sebesar 27.

4. Kondisi Ekonomi

Hasil analisis statistik deskripsi variabel kondisi ekonomi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,80, *median* sebesar 18,00, standar deviasi sebesar 2,213, variance sebesar 4,988 dengan nilai maksimum sebesar 20 dan nilai minimum sebesar 11.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskripsi variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,22, *median* sebesar 26,00, standar deviasi sebesar 2,823, variance sebesar 7,971 dengan nilai maksimum sebesar 30 dan nilai minimum sebesar 20.

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan kuisioner yang dibuat oleh peneliti pada setiap indikator. Uji validitas dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dan untuk mengetahui nilai r tabel dapat dihitung menggunakan rumus $n-2$ dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner, peneliti melakukan uji coba untuk melihat kevalidan kuisioner yang dilakukan kepada 30 responden,

dengan perhitungan $df = 30 - 2 = 28$, maka diperoleh r tabel 0.3610. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Coba Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keterangan
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0,417	0,3610	Valid
	X1.2	0,394	0,3610	Valid
	X1.3	0,484	0,3610	Valid
	X1.4	0,499	0,3610	Valid
	X1.5	0,465	0,3610	Valid
	X1.6	0,571	0,3610	Valid
	X1.7	0,516	0,3610	Valid
	X1.8	0,438	0,3610	Valid
	X1.9	0,398	0,3610	Valid
	X1.10	0,416	0,3610	Valid
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	X2.1	0,798	0,3610	Valid
	X2.2	0,774	0,3610	Valid
	X2.3	0,751	0,3610	Valid
	X2.4	0,609	0,3610	Valid
	X2.5	0,709	0,3610	Valid
	X2.6	0,654	0,3610	Valid
Modernisasi Sitem	X3.1	0,726	0,3610	Valid
	X3.2	0,696	0,3610	Valid
	X3.3	0,754	0,3610	Valid

Administrasi Perpajakan	X3.4	0,717	0,3610	Valid
	X3.5	0,764	0,3610	Valid
	X3.6	0,820	0,3610	Valid
	X3.7	0,742	0,3610	Valid
	X3.8	0,831	0,3610	Valid
Kondisi Ekonomi	X4.1	0,712	0,3610	Valid
	X4.2	0,707	0,3610	Valid
	X4.3	0,845	0,3610	Valid
	X4.4	0,694	0,3610	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,623	0,3610	Valid
	Y2	0,857	0,3610	Valid
	Y3	0,816	0,3610	Valid
	Y4	0,800	0,3610	Valid
	Y5	0,804	0,3610	Valid
	Y6	0,853	0,3610	Valid

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai r hitung > dari r tabel yang dimana kuisinoner dalam penelitian ini dinyatakan valid. Setelah melakukan uji coba validitas maka peneliti melakukan uji validitas kepada 100 sampel yang dimana diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966 dari perhitungan $df = 100 - 2 = 98$, dalam r tabel angka tersebut menunjukkan 0.1966. Adapun hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keterangan
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0,249	0,1966	Valid
	X1.2	0,208	0,1966	Valid
	X1.3	0,323	0,1966	Valid
	X1.4	0,358	0,1966	Valid
	X1.5	0,375	0,1966	Valid
	X1.6	0,342	0,1966	Valid
	X1.7	0,332	0,1966	Valid
	X1.8	0,373	0,1966	Valid
	X1.9	0,387	0,1966	Valid
	X1.10	0,201	0,1966	Valid
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	X2.1	0,707	0,1966	Valid
	X2.2	0,741	0,1966	Valid
	X2.3	0,786	0,1966	Valid
	X2.4	0,732	0,1966	Valid
	X2.5	0,692	0,1966	Valid
	X2.6	0,596	0,1966	Valid
Modernisasi Sitem	X3.1	0,741	0,1966	Valid
	X3.2	0,721	0,1966	Valid
	X3.3	0,771	0,1966	Valid
	X3.4	0,737	0,1966	Valid

Administrasi Perpajakan	X3.5	0,785	0,1966	Valid
	X3.6	0,824	0,1966	Valid
	X3.7	0,717	0,1966	Valid
	X3.8	0,762	0,1966	Valid
Kondisi Ekonomi	X4.1	0,571	0,1966	Valid
	X4.2	0,733	0,1966	Valid
	X4.3	0,874	0,1966	Valid
	X4.4	0,807	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,752	0,1966	Valid
	Y2	0,842	0,1966	Valid
	Y3	0,702	0,1966	Valid
	Y4	0,750	0,1966	Valid
	Y5	0,773	0,1966	Valid
	Y6	0,775	0,1966	Valid

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai r hitung $>$ r tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan valid.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuisisioner yang digunakan peneliti dapat diandalkan atau reliable apabila penelitian dilakukan berulang kali. Uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Sebelum melakukan penyebaran kuisisioner, peneliti melakukan

uji coba untuk melihat kevalidan kuisinoner yang dilakukan kepada 30 responden, adapun hasil uji coba uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas

Variabel	Crobach's Alpha	Crobach's Value	Keterangan
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,740	0,60	Reliabel
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,802	0,60	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0,890	0,60	Reliabel
Kondisi Ekonomi (X4)	0,703	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,880	0,60	Reliabel

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha $> 0,60$ yang dimana kuisinoner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Setelah melakukan uji coba reliabilitas maka pada penelitian ini peneliti menyebar 100 kuisinoner kepada responden yang dijadikan sampel. Adapun hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crobach's Alpha	Crobach's Value	Keterangan
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,693	0,60	Reliabel

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,798	0,60	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0,893	0,60	Reliabel
Kondisi Ekonomi (X4)	0,743	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,858	0,60	Reliabel

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Variabel X1 memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,693 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60
2. Variabel X2 memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,798 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
3. Variabel X3 memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,893 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
4. Variabel X4 memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,743 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
5. Variabel Y memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,858 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kusioner pada setiap variabel pada penelitian ini reliable atau dapat diandalkan.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini merupakan salah satu pengujian yang harus dilakukan untuk menganalisis apakah dalam regresi linear berganda memiliki masalah-masalah asumsi klasik dan harus sesuai dengan hipotesis supaya bebas

dari bias. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 pengujian yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas

4.5.1 Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ini ditemukan hubungan antara variabel bebas/independen. Dalam suatu penelitian dalam model regresi yang baik itu sebaiknya tidak ada korelasi antar variabel independen. Penentuan apakah penelitian tidak terjadi multikolinearitas atau tidak dapat ditentukan dengan nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Facto*). Dalam pengujian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10,00. Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.998	1.002	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	0.963	1.039	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.957	1.045	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kondisi Ekonomi	0.945	1.058	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi multikolinearitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai tolerance $0.998 > 0.10$ dan nilai VIF $1.002 < 10,00$
2. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah memiliki nilai tolerance $0.963 > 0.10$ dan nilai VIF $1.039 < 10,00$
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai tolerance $0.957 > 0.10$ dan nilai VIF $1.045 < 10,00$
4. Kondisi Ekonomi memiliki nilai tolerance $0.945 > 0.10$ dan nilai VIF $1.058 < 10,00$.

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) $< 10,00$. Sehingga antar variabel independen bebas dari gejala multikolinearitas dan dapat dikatakan baik.

4.5.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini dapat menggunakan dengan uji Kolmogrov Smirnov, yaitu dengan melihat nilai sig $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28913659
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.049
Test Statistic		.049

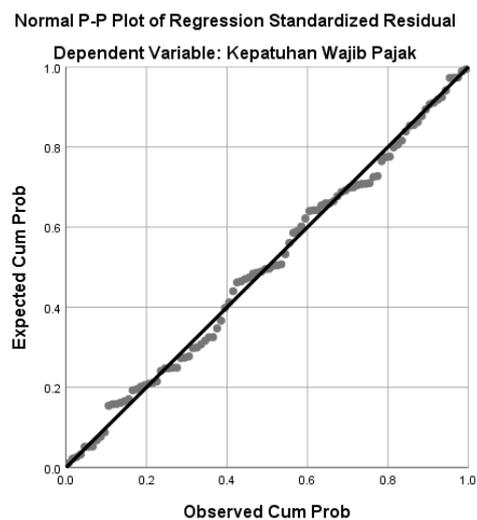
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa $0,200 > 0,05$ yang artinya penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas P - Plot



Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa titik titik yang tersebat pada gambar tersebut tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas

4.5.3 Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual Antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Dimana penelitian yang

baik itu merupakan penelitian yang tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Pengujian ini dapat digunakan menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat hasil uji gletser dan uji *scatterplot*. Dalam uji gletser ini dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas yaitu apabila nilai sig > 0,05. Adapun hasil uji heteroskedasitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.411	2.513		.561	.576
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.049	.148	.034	.331	.741
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.001	.049	-.002	-.018	.985
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.024	.035	-.072	-.687	.493
	Kondisi Ekonomi	.047	.065	.075	.716	.476

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

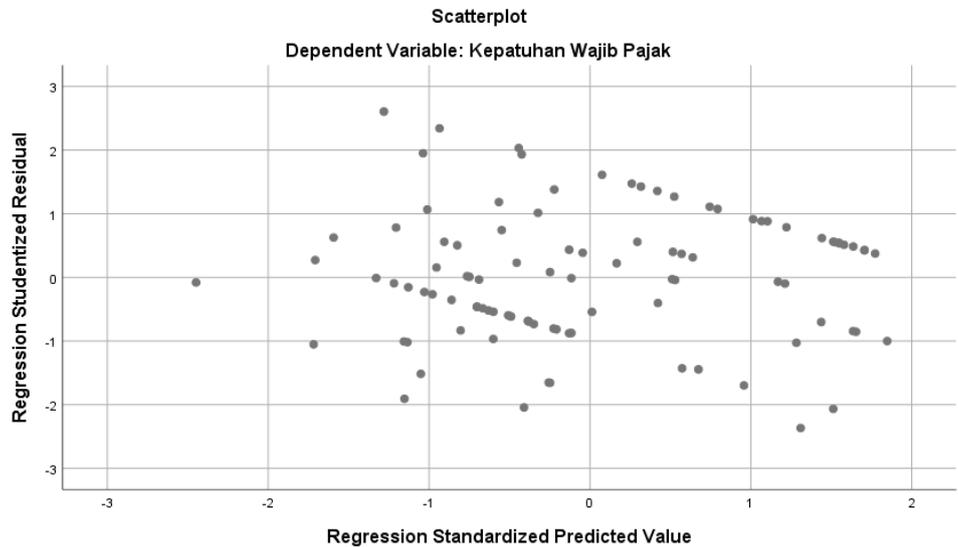
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikan $0.741 > 0.05$
2. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah memiliki nilai signifikan $0.985 > 0.05$
3. Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikan $0.493 > 0.05$
4. Kondisi Ekonomi memiliki nilai signifikan $0.476 > 0.05$

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai

signifikan lebih dari 0.05, Sehingga penelitian ini dikatakan baik karena bebas dari gejala heteroskedasitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Scaterplot



Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedasitas yang ditandai dengan beberapa ciri pada gambar *scatterplot*, antara lain:

1. Tidak ada pola yang jelas
2. Titik menyebar diatas dan dibawah angka nol
3. Titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit)

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara 2 variabel independen atau lebih dengan variabel dependen apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. Adapun hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.327	1.728		5.978	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.379	.101	.189	3.733	.000
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.022	.024	-.047	-.908	.366
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.561	.034	.858	16.612	.001
Kondisi Ekonomi	-.058	.045	-.068	-1.302	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X1 + \beta_2.X2 + \beta_3. X3 + \beta_4, X4 + e$$

$$Y = 10.327 + 0.379 X1 + (-0.022) X2 + 0.561 X3 + (-0.058) X4 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a: Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_2 : Koefisien Regresi Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

β_3 : Koefisien Regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

β_4 : Koefisien Regresi Kondisi Ekonomi

X1: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

X2: Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

X3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X4: Kondisi Ekonomi

e: error term

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 10.327 dan bernilai positif, artinya bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3), dan Kondisi Ekonomi (X4) nilainya adalah nol (0) dan tidak terjadi perubahan. Maka, nilai dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 10.327.
2. Koefisien Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) bernilai sebesar 0.379 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan tingkat pemahaman peraturan perpajakan atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.379 dan sebaliknya.
3. Koefisien Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) bernilai sebesar -0.022 dan bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan tingkat kepercayaan pada pemerintah atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.022 dan sebaliknya.
4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) bernilai sebesar 0.561 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Modernisasi sistem administrasi perpajakan atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.561 dan sebaliknya.
5. Koefisien Kondisi Ekonomi (X4) bernilai sebesar -0.058 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Kondisi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan kondisi ekonomi atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.058 dan sebaliknya.

4.6.1 Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.23
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.756	.746	.958

a. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien pada *Adjusted R Square* nilainya sebesar 0.746, maka dari itu variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3), Kondisi Ekonomi (X4) dipengaruhi secara simultan sebesar 74,6%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 25,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4.6.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji Hipotesis T ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai t hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji ini antara lain:

- Jika nilai signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung > t tabel artinya bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis diterima
- Jika nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung < t tabel artinya bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis ditolak

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran t tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = (a/2 ; n - k - 1)$$

$$df = (0.05/2 ; 100 - 4 - 1)$$

$$df = (0.025 ; 95)$$

$$df = 1,98525$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.985. Adapun hasil uji hipotesis T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Hasil Uji Parsial (uji T)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.327	1.728		5.978	.000
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.379	.101	.189	3.733	.000
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.022	.024	-.047	-.908	.366
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.561	.034	.858	16.612	.001
	Kondisi Ekonomi	-.058	.045	-.068	-1.302	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.24 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap setiap variabel independen adalah sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar 3.733 yang artinya $3.733 > 1.985$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, karena nilai signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung $> t$ tabel dan variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.366 yang artinya $0.366 > 0.05$ dan nilai t hitung sebesar -0.908 yang artinya $-0.908 < 1.985$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, karena nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.001 yang artinya $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar 16.612 yang artinya $16.612 > 1.985$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**, karena nilai signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung $> t$ tabel dan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perppajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Kondisi Ekonomi (X4) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.196 yang artinya $0.196 > 0.05$ dan nilai t hitung sebesar -1.302 yang artinya $-1.302 < 1.985$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak**, karena nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Kondisi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji Hipotesis F ini digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai f hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji ini antara lain:

- Jika nilai signifikansi < 0.05 dan nilai f hitung $> f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y)
- Jika nilai signifikansi > 0.05 dan nilai f hitung $< f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran t tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = (k ; n - k)$$

$$df = (4 ; 100 - 4)$$

$$df = (4 ; 96)$$

$$df = 2.47$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai f tabel sebesar 2.47. Adapun hasil uji hipotesis F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.25

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270.386	4	67.596	73.638	.000 ^b
	Residual	87.206	95	.918		
	Total	357.592	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi, Tingkat Pemahaman Peeraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: diolah SPSS 25 (data primer)

Berdasarkan Tabel 4.25 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 73.636 artinya $73.638 > 2.47$ dan nilai signifikansi sebesar 0.000 artinya $0.000 < 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kondisi Ekonomi memiliki pengaruh positif secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

4.7 Pembahasan dan Analisis Data

4.7.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengatakan bahwa “Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan hipotesis tersebut diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.379 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan tingkat pemahaman peraturan perpajakan atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.379 dan sebaliknya. Selain itu dibuktikan juga dengan hasil uji T parsial yang memperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar $3.733 > 1.985$ dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$, maka H1 diterima. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang. Artinya semakin tinggi atau baik pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM.

Pemahaman peraturan perpajakan yang bagus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti dalam membayar pajak. Selain itu apabila wajib pajak mempunyai wawasan yang yang tinggi terhadap perpajakan maka hal tersebut akan menjadi alasan pentingnya membayar pajak supaya dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Selain itu, kaitannya dengan pelaporan SPT, apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih terkait peraturan perpajakan maka akan menjadi salah satu faktor wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019)⁷³ yang mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian dari Rinaldi Zentira, dkk (2020)⁷⁴ yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kaitannya dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang merujuk pada *Attitude Toward Behavior*/sikap terhadap suatu perilkubahwa para wajib pajak akan patuh terkait perpajakan bersumber pada niat wajib pajak itu sendiri untuk melakukan sesuatu tindakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga sikap individu juga dapat mempengaruhi niat seseorang untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Artinya jika wajib pajak memiliki niat yang tinggi untuk memahami terkait peraturan perpajakan maka akan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

4.7.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengatakan bahwa “Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap

⁷³ Pipit Annisa Fitria and Edy Supriyono, ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Journal of Economics and Banking*, 1.1 (2019), 47–54.

⁷⁴ Fikri and others, op.cit.

kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa Tingkat pada Pemerintah Kepercayaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0.22 dan bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan tingkat kepercayaan pada pemerintah atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.022 dan sebaliknya. Selain itu dibuktikan juga hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji T parsial yang memperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar $-0.908 < 1.985$ dan nilai signifikan sebesar $0.366 > 0.05$, maka H2 ditolak. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah sangat mempengaruhi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat percaya pada mekanisme pemerintah yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan membuat para wajib pajak sadar akan membayar pajak dan membuat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Dalam hal ini wajib pajak masih belum percaya bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana pajak yang di bayar oleh wajib pajak sebagaimana mestinya. Seperti pada data yang peneliti peroleh dari kuisisioner pada variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah pada pernyataan ketiga yang berbunyi “saya percaya pada sistem pemerintah dalam perpajakan”. Dalam pernyataan tersebut masih terdapat beberapa para wajib pajak yang tidak setuju akan sistem pemerintah dalam perpajakan. Selain itu juga masih banyak para wajib pajak yang belum sepenuhnya percaya bahwa dana pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak sudah dipergunakan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan rakyat sehingga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Saat ini

banyak sekali berita terkait kasus korupsi yang dilakukan aparat pajak, penggelapan pajak, aparat pajak yang tidak melampirkan besaran harta yang sesuai dan beberapa kasus tersebut membuat para wajib pajak muncul rasa kurang percaya terhadap pemerintah pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari diah wahyu dan noer sasongko (2017)⁷⁵ yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan fastha aulia dan juwita sari (2022)⁷⁶ yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) kepercayaan pada pemerintah ini berkaitan dengan sikap wajib pajak yang akan timbul dari niat wajib pajak. Para wajib pajak masih belum percaya terhadap aparat pemerintah hal tersebut yang dapat mempengaruhi perilaku atau sikap dari wajib pajak atau kaitannya dengan *normative belief/norma* subjektif yang dimana norma-norma sosial yang terdapat di sekitar lingkungan dan dianggap penting oleh wajib pajak itu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan para wajib pajak juga berfikir secara rasional akan dana yang dibayarkan oleh para wajib pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya.

4.7.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengatakan bahwa “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan hipotesis tersebut diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

⁷⁵ Wijayanti and Saongko.

⁷⁶ Fastha Aulia Pradhani and Juwita Sari, 'Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5.2 (2022), 279–95 <<https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>>.

Hasil analisis tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.561 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Modernisasi sistem administrasi perpajakan atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.561 dan sebaliknya. Selain itu hal tersebut dibuktikan juga dengan hasil uji T parsial yang memperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar 16.612 > 1.985 dan nilai signifikan sebesar $0.001 < 0.05$, maka H3 diterima. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang. Artinya semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM.

Sistem administrasi yang lebih modern dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya digitalisasi saat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT seperti diciptakannya e-filing, e-billing, maupun e-form yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan lebih hemat. Hal tersebut termuat dalam penelitian ini pada pernyataan kuisisioner yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan dalam pelaporan SPT secara elektronik melalui e-filing. Perubahan sistem administrasi yang dulunya masih manual dengan sekarang yang lebih modern ini menjadi peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020)⁷⁷ yang menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) ini di dalamnya berhubungan

⁷⁷ Anita Hapsari and Nur Kholis, 'Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar', *Reviu Akuntansi Dan Binsis Indonesia*, 4.1 (2020), 56–67 <<https://doi.org/10.18196/rab.040153>>.

langsung dengan *control belief*/control perilaku, dimana hal tersebut merujuk pada hal-hal apa saja yang dapat menghambat serta mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

4.7.4 Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini mengatakan bahwa “Kondisi Ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa Kondisi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0.058 dan bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Kondisi Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan kondisi ekonomi atau naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.058 dan sebaliknya. Selain itu dibuktikan juga dengan hasil uji T parsial yang memperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar -1.302 < 1.985 dan nilai signifikan sebesar 0.196 > 0.05, maka H4 ditolak. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Kondisi Ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Semarang.

Kondisi ekonomi seperti keuangan atau penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan para pelaku UMKM menjadi hal yang paling utama. Tinggi atau rendahnya penghasilan yang diperoleh para pelaku UMKM tidak akan mempengaruhi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi keuangan yang baik, dapat membuat para wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, seharusnya dengan kondisi ekonomi yang tinggi maka akan dapat membuat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dalam *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) kondisi ekonomi ini bertolak belakang dengan adanya *control belief*/kontrol perilaku, yang dimana dalam

kontrol perilaku ini mengukur seberapa besar control perilaku atau hal-hal yang dapat menghalangi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di bahas di bab sebelumnya, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0.379 dan bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $3.733 > 1.985$ dan hasil nilai signifikansi $<$ 0.05 sebesar $0.000 < 0.05$.
2. Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar -0.022 dan bernilai negatif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $-0.908 <$ 1.985 dan hasil nilai signifikansi $<$ 0.05 sebesar $0.366 > 0.05$.
3. Modernisasi Sistem Administerasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0.561 dan bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $16.612 > 1.985$ dan hasil nilai signifikansi $<$ 0.05 sebesar $0.001 < 0.05$.
4. Kondisi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar -0.058 dan bernilai negatif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $-1.302 <$ 1.985 dan hasil nilai signifikansi $<$ 0.05 sebesar $0.196 > 0.05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang peneliti sampaikan di atas, maka dikemukakan saran-saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, Antara lain:

a. Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Akuntansi khususnya di bidang perpajakan baik secara materi ataupun praktek langsung. Selain itu adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan pemerintah dan kondisi ekonomi ditolak. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembuktian ulang terkait variabel tersebut dan diharapkan adanya peningkatan penelitian terkait kedua variabel tersebut.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel independen lain diluar variabel pada penelitian ini seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak, dll. Mengingat masih ada 25,4% dari variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

b. Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Pajak

Terdapat beberapa saran atau masukan bagi pemerintah maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak, Antara lain:

- a. Dari hasil penelitian di atas, tingkat kepercayaan pada pemerintah masih rendah, hal tersebut membuat para wajib pajak berharap para pemerintah dapat melaksanakan hal-hal yang lebih positif dan dapat

meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dan menjaga nama baik aparat pajak agar dapat para wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak

b. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih baik lagi supaya para wajib pajak khususnya para UMKM lebih paham terkait peraturan perpajakan seperti diadakan penyuluhan ataupun pelayanan yang lebih optimal.

3. Bagi Wajib Pajak

a. Para wajib pajak diharapkan dapat mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan perpajakan yang lebih modern supaya meningkatkan pemahaman perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

b. Diharapkan para wajib pajak lebih meningkatkan lagi kewajiban sebagai wajib pajak seperti membayar pajak, dan tidak menunda-nunda untuk pelaporan SPT Tahunan mengingat pentingnya pendapatan pajak ini bagi suatu negara.

5.3 Batasan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penulisan penelitian masih belum maksimal. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya berjumlah 100 responden, yang dimana hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang didapatkan.
2. Dari hasil olah data yang sudah dilakukan masih ada 25,4% variabel-variabel lain yang belum bisa peneliti lakukan yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Muhammad Dimas, 'Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak USAHA, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', 2018
- Adiasa, N, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Referensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*, 2013
- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), 235–43
- Akbar, Rifandhi Nur, 'Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)', *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*, 1.1 (2015), 1–25
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuthi, 'Tafsir Jalalain'
- Anggraeni, Vinska Kiki, and Tirza Oktovianti Lenggono, 'Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9.1 (2021), 96–108 <<https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>>
- Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi (Mafatih Al-Ghaib)* (Kairo: Dar el-hadith, 2012)
- As-Suyuthi, Imam, *Ad-Durrul Mantsur* (Beirut: Darul Fikri, 2011)
- Asrianti, 'Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan) Skripsi', *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018, 1–150
- Bobek, Donna D, and Richard C Hatfield, 'An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance', *Behavioral Research in Accounting*, 15 (2003)
- Dahrani, Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, and Jufrizen Jufrizen, 'Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan)', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.02 (2021), 379–89 <<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>>
- Effendy, Tommy Surya, and Agus Arianto Toly, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai', *Tax & Accounting Review*, 1.1 (2013), 159
- Fadilah, Lutfah, Asrofi Langgeng Noermansyah, and Krisdiyawati Krisdiyawati, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19', *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2021), 450–59 <<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>>

- Fastha Aulia Pradhani, and Juwita Sari, 'Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5.2 (2022), 279–95 <<https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>>
- Fikri, Rinaldi Zentira, Mourris Sagara, Didin Hadi Saputra, and Nasuhi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM', *Journal of Aplied Business and Economics (JABE)*, 7.2 (2020), 294–305
- Fitria, Pipit Annisa, and Edy Supriyono, 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Journal of Economics and Banking*, 1.1 (2019), 47–54
- Francis, Jillian J, mERTIN P ECCLES, and MARIE Johnston, *Constructing Questionnaires Based On The Theory of Planned BBehaviour: A Manual for Health Services Researcher*, Center for Health Services Research, 2004
- Handke, Lisa, and Luisa Barthauer, 'The Psychology of Interpersonal Relations', 1958, 2019, 259–62 <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_59>
- Hapsari, Anita, and Nur Kholis, 'Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar', *Reviu Akuntansi Dan Binsis Indonesia*, 4.1 (2020), 56–67 <<https://doi.org/10.18196/rab.040153>>
- Hidayat, Widi, and Argo Adhi Nugroho, 'Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, 12.2 (2010), 82–93
- Indiantoro, NUR, and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*, I (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013) <https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I>
- Indrawan, Rizki, and Bani Binekas, 'PPemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Txes and Knowledge of Txes on Compliance with SME Taxpayers', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6.3 (2018), 419–28 <<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>>
- Indrayani, Ni Made Meisintia, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I Made Sudiartana, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Kharisma*, 4.2 (2022), 115–25
- Katsir, Ibnu, *Tafsirul Qur'anil Azhim, Riyadh, Dar Thayyibah Lin Nasyri Wa Tauzi'*

- Latief, Salman, Junaidin Zakaria, and Mapparenta, 'Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Center of Economic Student Journal*, 3.3 (2020), 271–89 <<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>>
- Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, and Mutiara Maimunah, 'Tax Compliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang', *Junal InFestasi*, 13.2 (2017), 354–66
- Ma'ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20.2 (2020), 276–84 <<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>>
- Marjan, Restu mutmainnah, *Pengauh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*, 2014
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari, 'Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 28.1 (2023), 1–19 <<https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>>
- Noviana, Rika, Afifudin, and Hariri, 'PENGARUH SOSIALISAI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NI. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang)', 09.04 (2020), 51–67
- Oktaviani, Rachmawati Meita, 'Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory', *JURNAL BISNIS DAN EKONOMI*, 22.1 (2015), 85–96
- Olivandy, Nathania Aldisa, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19', *Wahana Riset Akuntansi*, 9.2 (2021), 91–105 <<https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>>
- Pebrina, Rizky, and Amir Hidayatulloh, 'Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>>
- Permadi, T, A Nasir, and Y Anisma, 'Studi Kemauan Membayar Pajak Pada WP OP Yang Melakukan [Ekerjaan Bebas: Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru]', *Jurnal Ekonomi*, 21.2 (2013), 1–18
- Pramesti, Ridyaning Dian, 'Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kulaitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)', 7.2 (2018), 44–68
- Pravasanti, Yuwita Ariessa, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal*

- Akuntansi Dan Pajak*, 21.01 (2020), 142–51
<<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>>
- Purnaditya, Riano Roy, ‘Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari)’, 2015
- Qadariah, Rimawati, Nur Daiana, and Junaidi, ‘Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Norma Subjektif Kualitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *E-Jra*, 10.07 (2021), 13–24
- Risa, Nurma, and Mayta Rizky Puspita Sari, ‘Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bekasi’, *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12.83 (2021), 20–37
- Sarasawati, Zulaicha Efrita, Endang Masitoh, and Riana Rachmawati Dewi, ‘Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta’, *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2.02 (2018), 45–52
<<https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>>
- Sari, Alwi Raninda, and Dewi Rejeki, ‘PENGARUH EFEKTIVITAS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Survey Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor P)’, *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22.2 (2021)
<<https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>>
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy, ‘Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening’, *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4.2 (2020), 603–15
<<https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>>
- Sari sasi gendro, dea aulya, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022
- Setiawan, Eko Yudi, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib [Ajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar)’, *Jurnal of Accounting Unpad*, 5.2 (2018), 45–60
- Siregar, Dian Lestari, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam’, *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1.2 (2017), 119–28
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet-10 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)

- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Syofiyani, Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Tafsir, 'Surah Al-Baqarah Ayat 117', *Tafsirweb.Com*, p. accessed August 4, 2023 <<https://tafsirweb.com/542-surat-al-baqarah-ayat-117.html>>
- Thalia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketifakpatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Medan*, 2019
- Umniah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, Fajar Adhitya, Warno, Naili Saadah, and others, 'The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>
- Warno, and Ulul Fahmi, 'Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45', *El Muhasaba : Jurnal Akuntansi*, 11.2 (2020), 188–201
- Wijayanti, Diah Wahyu, and Noer Saongko, 'PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR WAJIB PAJAK (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)', *Peran Profesi Akutansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, 2017, 308–26
- Witono, Bayu, 'Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, 7.2 (2008), 196–208
- Wulandari, Sri, and Astri Fitria, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.7 (2021), 1–18
- Yunus, Mahmud, *Studi Tafsir Qur`an Karim*, 1938

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Wajib Pajak UMKM

Di Wilayah Kota Semarang

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan kali ini, pekenankan saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan dalam rangka memenuhi syarat akhir penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM Kota Semarang)”**. Penelitian ini menggunakan kuisisioner, dan jawaban yang dipilih tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang diberikan adalah benar. Data yang diperoleh hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk keperluan lainnya serta akan menjamin kerahasiaan identitas responden.

Demikian permohonan ini dibuat, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Dilatul Aghniya

C. Pernyataan/Pertanyaan Kuisioner

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya patuh mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Saya selalu tepat waktu dan patuh dalam membayar pajak					
3.	Saya selalu melakukan pelaporan SPT tepat waktu/tidak pernah terlambat					
4.	Saya patuh mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5.	Saya patuh dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar dan teliti					
6.	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak					

2. Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan

1. NPWP Kepanjangan dari?
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Nomor Pengukuhan Wajib Pengusaha
 - c. Nomor Pengusaha Wajib Pribadi
 - d. Nomor Pinjaman Wajib Pajak
 - e. Nomor Pembayaran Wajib Pajak
2. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan?
 - a. Hak dan Kewajiban Pajak
 - b. Pinjaman Kredit
 - c. Alat Pembayaran
 - d. Sensus Perpajakan
 - e. Kewajiban Perpajakan
3. Apabila wajib pajak telat atau tidak membayar pajak maka akan dikenakan?
 - a. Pencabutan NPWP
 - b. Penetapan Pajak

- c. Sanksi Pajak
 - d. Penghapusan Pajak
 - e. Pencabutan Pajak
4. Sistem perpajakan yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri adalah?
 - a. Official Assesment System
 - b. Self Assesment System
 - c. Withholding Assesment Sytem
 - d. Sosial Assesment Sytem
 - e. Regularend Assesment System
 5. Dasar pengenaan pajak yang sesuai atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak Adalah?
 - a. Surat Paksa
 - b. Sumber Pajak
 - c. Pembayar Pajak
 - d. Penanggung pajak
 - e. Tarif Pajak
 6. Apakah kepanjangan dari PTKP?
 - a. Penghasilan Tidak Kena Pajak
 - b. Penetapan Tidak Kena Pajak
 - c. Pinjaman Tidak Kena Pajak
 - d. Pungutan Tidak Kena Pajak
 - e. Progresif Tidak Kena Pajak
 7. Apakah Kepanjangan dari PKP?
 - a. Pinjaman Kena Pajak
 - b. Pungutan Kena Pajak
 - c. Persyaratan Kena Pajak
 - d. Penghasilan Kena Pajak
 - e. Penetapan Kena Pajak
 8. Tanggal berapa batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi?
 - a. 30 Maret

- b. 30 April
 - c. 30 Agustus
 - d. 31 Maret
 - e. 29 Maret
9. Berapa jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan?
- a. Rp 54.000.000 per tahun
 - b. Rp 50.000.000 per tahun
 - c. Rp 60.000.000 per tahun
 - d. Rp 56.000.000 per tahun
 - e. Rp 64.000.000 per tahun
10. Berapa jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak yang sudah kawin?
- a. Rp 4.000.000
 - b. Rp 5.000.000
 - c. Rp 6.000.000
 - d. Rp 4.500.000
 - e. Rp 5.500.000

3. Variabel Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya percaya pada sistem pemerintah dalam perpajakan					
2.	Saya percaya terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam perpajakan					
3.	Saya percaya bahwa pajak yang sudah dibayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan/kepentingan rakyat dan keperluan negara seperti pembangunan					
4.	Saya percaya bahwa aparat/pemerintah pajak akan berlaku adil dan bijaksana kepada orang yang melakukan pelanggaran pajak					
5.	Saya percaya kepada fiskus (pemungut pajak) akan memotong pajak sesuai dengan jumlah yang benar atau sebenarnya					

6.	Saya percaya bahwa keuangan negara dari hasil pajak dikelola dengan efektif, efisien, dan transparan					
----	--	--	--	--	--	--

4. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan saya dalam memenuhi kewajibannya					
2.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan					
3.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat mempermudah saya untuk mengetahui peraturan perpajakan yang diakses lebih cepat dan efisien melalui internet					
4.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat membuat saya lebih hemat karna tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT					
5.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan saya dalam pelaporan SPT secara elektronik seperti e-filling					
6.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan saya dalam menghitung pajak lebih cepat dan tepat					
7.	Digitalisasi administrasi perpajakan memudahkan saya dalam melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja					
8.	Digitalisasi administrasi perpajakan dapat memudahkan saya dalam pembayaran pajak secara online dan prosesnya cepat					

5. Variabel Kondisi Ekonomi

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya akan tetap melakukan kewajiban sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak walaupun kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan maupun fluktuasi					
2.	Meskipun pengeluaran usaha saya sedang besar tidak akan mempengaruhi kewajiban saya dalam membayar pajak sebagai wajib pajak					

3.	Besarnya maupun kecilnya pendapatan yang saya peroleh tidak akan menjadi penghalang saya untuk membayar pajak					
4.	Meskipun semakin bersaingnya harga-harga produsen tidak akan mempengaruhi saya dalam memenuhi kewajiban saya dalam membayar pajak					

Lampiran 2.1 Tabulasi Jawaban Responden

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak						Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	4	3	3	4	3	22
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	3	4	23
10	5	5	5	5	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	5	4	5	4	28
15	4	4	4	5	5	5	27
16	4	4	5	5	5	5	28
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	5	5	5	4	4	28
20	4	4	4	4	4	4	24
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	4	5	5	5	27
24	4	3	4	4	4	3	22
25	4	3	4	4	3	3	21
26	4	4	4	5	4	4	25
27	4	4	5	4	4	4	25
28	3	5	4	5	4	5	26
29	3	5	4	5	5	4	26
30	3	3	4	4	4	3	21
31	3	3	4	5	4	4	23
32	4	4	5	4	4	4	25
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	5	5	4	5	4	5	28

36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	4	29
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	4	4	24
40	5	5	5	5	5	5	30
41	3	4	5	5	3	4	24
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	5	5	4	5	27
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	5	5	5	27
47	4	5	5	5	5	5	29
48	3	3	4	4	4	4	22
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	5	5	26
51	4	4	4	4	4	4	24
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	5	5	3	3	24
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	5	5	5	27
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	5	4	4	4	25
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	5	5	5	27
62	5	5	5	5	4	4	28
63	4	4	4	3	3	4	22
64	4	4	5	4	5	3	25
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	5	5	5	4	5	28
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	5	5	3	4	25
70	3	2	5	5	3	3	21
71	5	5	5	5	5	5	30
72	3	4	5	5	5	5	27
73	3	4	4	4	4	4	23
74	5	5	5	5	5	5	30
75	4	4	3	4	4	5	24
76	5	5	5	5	5	5	30

77	5	4	4	4	4	5	26
78	4	4	4	5	5	5	27
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	5	5	5	5	30
81	5	5	5	5	5	5	30
82	5	5	5	5	5	5	30
83	5	5	5	5	5	5	30
84	4	4	5	5	4	5	27
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	4	5	3	4	26
90	5	5	5	5	5	3	28
91	4	4	4	4	3	3	22
92	5	5	5	5	3	4	27
93	4	5	4	5	4	4	26
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	4	5	5	4	5	27
96	4	4	4	4	4	4	24
97	3	3	4	4	3	3	20
98	5	5	4	4	4	4	26
99	4	3	5	4	4	5	25
100	4	4	4	4	5	5	26

b. Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Responden	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
4	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8
5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
7	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
11	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9

12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
16	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
18	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
19	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
20	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
21	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
22	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
23	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
24	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
25	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
26	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
27	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
28	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
29	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
30	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
32	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
36	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
38	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
43	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
44	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
45	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
46	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7
47	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
48	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9

53	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9
54	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
57	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
58	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8
59	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
60	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
61	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
62	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
64	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
65	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
67	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
68	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
69	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
70	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	7
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
73	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8
74	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
76	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	7
77	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
78	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
80	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
82	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
83	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
85	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
87	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
91	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
93	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8

94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
95	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
96	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
97	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
98	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
100	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8

c. Variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)

Responden	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah						Total X2
	X2.1	X2.1	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	5	5	4	3	3	24
7	3	3	5	5	4	5	25
8	4	4	4	4	4	5	25
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	2	5	4	26
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	3	4	4	5	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	5	5	5	5	28
15	5	5	5	5	5	5	30
16	4	4	4	5	5	5	27
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	5	5	5	5	28
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	5	5	5	27
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	3	3	4	4	4	22
25	3	3	3	3	4	4	20
26	4	4	4	3	4	4	23
27	4	4	4	4	4	4	24
28	3	3	4	4	4	5	23
29	3	3	5	5	5	3	24

30	3	3	4	5	5	2	22
31	4	3	3	4	4	4	22
32	2	4	4	4	4	4	22
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	3	4	4	5	24
35	5	5	4	5	4	5	28
36	4	4	4	4	4	3	23
37	4	5	5	4	3	3	24
38	4	4	5	5	5	4	27
39	4	4	4	4	4	4	24
40	5	5	4	4	4	4	26
41	3	3	3	4	4	4	21
42	5	5	4	4	4	5	27
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	5	5	5	5	30
45	3	4	4	4	4	3	22
46	5	5	5	5	5	3	28
47	2	4	4	4	5	4	23
48	4	4	3	3	3	3	20
49	5	5	5	5	5	5	30
50	3	4	4	4	4	3	22
51	5	5	5	5	5	3	28
52	2	4	4	4	5	4	23
53	4	4	3	3	3	3	20
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	4	4	4	24
56	5	5	4	4	4	4	26
57	4	4	5	5	4	4	26
58	4	5	5	5	5	4	28
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	5	5	4	4	4	27
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	5	5	5	5	5	29
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	5	4	4	4	3	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	3	5	3	3	4	5	23
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	3	4	4	4	4	23
70	5	4	5	4	5	3	26

71	3	3	3	4	4	4	21
72	5	5	4	4	4	4	26
73	5	5	5	5	5	5	30
74	5	5	5	5	5	5	30
75	4	4	3	4	4	4	23
76	5	5	5	5	5	5	30
77	5	4	4	4	4	4	25
78	4	4	3	4	4	4	23
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	5	5	5	5	30
81	5	5	5	5	5	4	29
82	5	5	4	4	5	5	28
83	4	5	5	5	5	5	29
84	4	4	4	4	4	5	25
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	3	3	5	4	23
87	4	5	5	5	5	5	29
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	3	4	5	4	26
90	5	5	5	5	3	1	24
91	4	4	3	3	4	4	22
92	5	4	4	3	4	4	24
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	4	3	4	23
97	3	3	3	4	5	4	22
98	4	4	4	4	5	4	25
99	4	3	4	5	5	4	25
100	5	5	5	5	5	5	30

d. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Responden	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	5	3	5	3	4	4	3	3	30
4	3	3	4	5	3	3	4	3	28
5	4	3	4	4	4	3	4	3	29
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32

7	4	3	4	4	3	5	3	4	30
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	5	4	4	2	4	4	4	31
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	5	5	5	5	5	37
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	3	3	4	4	4	5	5	5	33
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	5	4	5	5	4	4	4	5	36
21	3	3	4	4	4	3	3	4	28
22	4	4	3	3	3	3	4	4	28
23	4	4	3	4	4	4	5	4	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	3	3	3	5	4	30
26	4	4	4	3	5	5	5	5	35
27	4	4	3	3	3	3	3	4	27
28	4	4	4	4	4	3	4	4	31
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	5	4	4	2	4	4	4	31
31	5	4	5	4	5	4	4	4	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	4	4	3	3	3	5	3	30
34	5	5	5	5	4	4	4	4	36
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	4	3	4	4	3	3	4	4	29
38	5	4	5	5	5	5	4	4	37
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	5	5	5	5	5	5	5	5	40
41	5	5	5	4	3	3	4	4	33
42	5	5	5	4	3	3	4	4	33
43	5	5	4	4	4	5	5	5	37
44	4	4	3	4	3	4	3	3	28
45	5	5	5	4	4	4	5	5	37
46	4	4	4	4	4	3	4	4	31
47	4	5	4	4	4	4	4	4	33

48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	4	4	4	5	5	4	4	35
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	5	5	5	5	5	5	5	5	40
52	5	5	5	5	5	5	5	5	40
53	5	5	5	5	5	5	5	5	40
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	5	4	4	4	5	5	5	5	37
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	5	5	5	3	5	5	4	5	37
60	3	3	4	4	4	4	4	4	30
61	4	5	4	3	5	3	4	3	31
62	4	4	4	4	3	3	4	3	29
63	5	5	5	5	5	4	3	5	37
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	4	4	4	4	5	4	5	5	35
68	3	3	3	3	4	3	4	4	27
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	5	5	5	5	5	5	5	5	40
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	4	4	4	4	4	4	4	5	33
73	3	4	5	3	2	4	4	5	30
74	4	3	4	3	4	4	5	4	31
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	5	4	5	5	5	5	5	5	39
77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	5	3	4	4	4	3	4	4	31
79	5	5	5	4	4	4	4	4	35
80	5	5	5	5	4	4	4	4	36
81	4	4	3	3	3	4	4	4	29
82	5	4	4	4	4	4	5	5	35
83	5	3	3	3	4	4	5	5	32
84	4	4	4	4	3	3	3	3	28
85	5	4	4	5	5	4	4	5	36
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	4	4	4	4	4	3	3	2	28
88	5	5	5	5	5	5	5	5	40

89	3	3	3	3	4	4	4	5	29
90	5	5	5	4	4	3	4	4	34
91	5	5	5	4	5	5	5	5	39
92	4	4	4	4	4	4	3	3	30
93	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	4	5	5	4	4	4	5	5	36
95	4	3	3	3	3	3	4	4	27
96	4	4	4	4	3	3	3	2	27
97	4	4	3	3	3	3	4	4	28
98	4	4	4	4	4	3	3	4	30
99	4	5	4	4	5	5	5	5	37
100	4	4	4	4	4	4	4	4	32

e. Variabel Kondisi Ekonomi (X4)

Responden	Kondisi Ekonomi				Total X4
	X4.1	X4.1	X4.3	X4.4	
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	20
6	5	5	2	4	16
7	4	4	4	4	16
8	5	5	4	4	18
9	4	4	4	4	16
10	5	5	4	2	16
11	4	4	2	4	14
12	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20
14	4	4	2	4	14
15	5	4	4	4	17
16	5	5	5	4	19
17	5	5	5	5	20
18	4	4	2	2	12
19	5	5	4	4	18
20	5	4	4	4	17
21	5	5	5	5	20
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	5	5	4	4	18

25	5	5	4	2	16
26	4	4	4	4	16
27	5	5	5	5	20
28	5	4	4	4	17
29	5	5	4	4	18
30	4	4	4	4	16
31	4	4	2	4	14
32	5	5	4	4	18
33	4	4	4	4	16
34	5	5	4	4	18
35	5	5	4	5	19
36	5	4	4	5	18
37	5	5	4	5	19
38	5	4	4	4	17
39	5	5	4	4	18
40	4	4	4	4	16
41	5	5	5	5	20
42	5	5	4	5	19
43	5	5	4	4	18
44	5	5	4	4	18
45	4	4	2	2	12
46	4	4	4	4	16
47	5	5	4	4	18
48	5	5	5	5	20
49	5	5	4	4	18
50	5	5	4	4	18
51	5	5	5	5	20
52	5	5	5	4	19
53	5	4	1	2	12
54	5	5	5	5	20
55	5	2	2	2	11
56	4	4	4	4	16
57	4	4	2	4	14
58	5	5	4	4	18
59	5	5	4	4	18
60	2	4	2	4	12
61	4	4	4	4	16
62	5	5	5	5	20
63	5	4	4	4	17
64	4	5	4	4	17
65	5	5	5	5	20

66	5	5	4	4	18
67	4	4	4	4	16
68	5	4	2	2	13
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	5	20
71	4	5	5	5	19
72	5	5	2	4	16
73	5	5	5	5	20
74	5	5	5	5	20
75	4	4	4	4	16
76	5	2	4	5	16
77	5	5	4	4	18
78	5	5	4	4	18
79	5	4	4	4	17
80	5	4	2	2	13
81	5	5	5	5	20
82	5	5	5	5	20
83	5	5	4	4	18
84	5	5	4	4	18
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	5	5	4	4	18
88	5	5	5	5	20
89	5	5	5	5	20
90	5	5	5	5	20
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	5	5	4	5	19
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	5	5	5	5	20
98	5	5	2	4	16
99	4	5	5	5	19
100	5	5	5	5	20

Lampiran 3.1 Hasil Output SPSS

Lampiran 3.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistics		
Total		
N	Valid	100
	Missing	0
Mean		8.81
Std. Error of Mean		.095
Median		9.00
Mode		9
Std. Deviation		.950
Variance		.903
Range		3
Minimum		7
Maximum		10
Sum		881

Statistics					
		TotalX2	TotalX3	TotalX4	TotalY
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		25.46	33.65	17.30	26.22
Std. Error of Mean		.290	.412	.221	.282
Median		24.00	32.00	18.00	26.00
Mode		24	32	16	24
Std. Deviation		2.904	4.120	2.213	2.823
Variance		8.433	16.977	4.899	7.971
Range		10	13	9	10
Minimum		20	27	11	20
Maximum		30	40	20	30
Sum		2546	3365	1730	2622

Lampiran 3.1.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Penelitian

i. Deskripsi Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	56	56.0	56.0	56.0
	Perempuan	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

ii. Deskripsi Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	10	10.0	10.0	10.0
	SMP	17	17.0	17.0	27.0
	SMA	25	25.0	25.0	52.0
	Diploma	20	20.0	20.0	72.0
	S1/Sarjana	25	25.0	25.0	97.0
	S2/Magister	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

iii. Deskripsi Alamat

Alamat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Banyumanik	1	1.0	1.0	1.0
	Candisari	1	1.0	1.0	2.0
	Gajahmungkur	1	1.0	1.0	3.0
	Gayamsari	2	2.0	2.0	5.0
	Genuk	2	2.0	2.0	7.0
	Gunungpati	2	2.0	2.0	9.0
	Mijen	5	5.0	5.0	14.0
	Ngaliyan	14	14.0	14.0	28.0
	Pedurungan	1	1.0	1.0	29.0
	Semarang Barat	8	8.0	8.0	37.0

	Semarang Selatan	3	3.0	3.0	40.0
	Semarang Tengah	12	12.0	12.0	52.0
	Semarang Timur	2	2.0	2.0	54.0
	Semarang Utara	11	11.0	11.0	65.0
	Tembalang	28	28.0	28.0	93.0
	Tugu	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

iv. Deskripsi Jenis UMKM

Jenis UMKM					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	UMKM Jasa	20	20.0	20.0	20.0
	UMKM Dagang	80	80.0	80.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

v. Deskripsi Kriteria UMKM

Kriteria UMKM					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	UMKM Mikro	90	90.0	90.0	90.0
	UMKM Kecil	5	5.0	5.0	95.0
	UMKM Menengah	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 3.1.3 Hasil Uji Coba Uji Validitas

A. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	1	.224	.302	.167	.134	.134	.167	.167	.196	.167	.417*

	Sig. (2-tailed)		.235	.105	.379	.481	.481	.379	.379	.299	.379	.249
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.224	1	.135	.149	.120	.120	.149	.149	.175	.149	.394**
	Sig. (2-tailed)	.235		.477	.432	.529	.529	.432	.432	.354	.432	.303
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.302	.135	1	.302	.141	-.161	.201	.201	.237	.201	.484*
	Sig. (2-tailed)	.105	.477		.105	.457	.395	.287	.287	.208	.287	.128
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	-.167	.149	.302	1	.356	-.089	-.111	-.111	-.131	-.111	.499**
	Sig. (2-tailed)	.379	.432	.105		.053	.640	.559	.559	.491	.559	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.134	.120	.141	.356	1	.464*	.089	.089	.105	.089	.465**
	Sig. (2-tailed)	.481	.529	.457	.053		.010	.640	.640	.581	.640	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	-.134	-.120	-.161	-.089	.464*	1	.356	-.089	-.105	-.089	.571*
	Sig. (2-tailed)	.481	.529	.395	.640	.010		.053	.640	.581	.640	.148
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.167	.149	.201	.111	-.089	.356	1	-.111	-.131	-.111	.516*
	Sig. (2-tailed)	.379	.432	.287	.559	.640	.053		.559	.491	.559	.933
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X1.8	Pearson Correlation	-.167	-.149	-.201	-.111	-.089	-.089	-.111	1	.850*	-.111	.438*
	Sig. (2-tailed)	.379	.432	.287	.559	.640	.640	.559		.000	.559	.068
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.9	Pearson Correlation	-.196	-.175	-.237	-.131	-.105	-.105	-.131	.850*	1	.196	.398*
	Sig. (2-tailed)	.299	.354	.208	.491	.581	.581	.491	.000		.299	.030
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.10	Pearson Correlation	.167	.149	.201	.111	.089	.089	.111	.111	.196	1	.416*
	Sig. (2-tailed)	.379	.432	.287	.559	.640	.640	.559	.559	.299		.933
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Tingkat Pemahaman Peraturan Perajakan	Pearson Correlation	-.217	.194	.284	.499*	.465*	.271	.016	.338	.398*	.016	1
	Sig. (2-tailed)	.249	.303	.128	.005	.010	.148	.933	.068	.030	.933	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

B. Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X2)

Correlations							
							Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	

X2.1	Pearson Correlation	1	.929**	.473**	.137	.431*	.470**	.798**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.469	.017	.009	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.929**	1	.586**	.128	.315	.374*	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.501	.090	.042	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.473**	.586**	1	.459*	.520**	.227	.751**
	Sig. (2-tailed)	.008	.001		.011	.003	.227	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.137	.128	.459*	1	.534**	.317	.609**
	Sig. (2-tailed)	.469	.501	.011		.002	.088	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.431*	.315	.520**	.534**	1	.336	.709**
	Sig. (2-tailed)	.017	.090	.003	.002		.070	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.470**	.374*	.227	.317	.336	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.009	.042	.227	.088	.070		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Pearson Correlation	.798**	.774**	.751**	.609**	.709**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
X3.1	Pearson Correlation	1	.646*	.705*	.370*	.491**	.499**	.329	.450*	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.044	.006	.005	.076	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.646*	1	.393*	.420*	.238	.447*	.553*	.600**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000		.032	.021	.204	.013	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.705*	.393*	1	.627**	.559**	.576**	.329	.450*	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.032		.000	.001	.001	.076	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.370*	.420*	.627*	1	.484**	.507**	.452*	.490**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.044	.021	.000		.007	.004	.012	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.491*	.238	.559*	.484**	1	.593**	.552*	.598**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.006	.204	.001	.007		.001	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.499*	.447*	.576*	.507**	.593**	1	.556*	.748**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.005	.013	.001	.004	.001		.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.7	Pearson Correlation	.329	.553*	.329	.452*	.552**	.556**	1	.679**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.076	.002	.076	.012	.002	.001		.000	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.8	Pearson Correlation	.450*	.600*	.450*	.490**	.598**	.748**	.679*	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.013	.000	.013	.006	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Moder nisasi Sistem Admini strasi Perpaj akan	Pearson Correlation	.726*	.696*	.754*	.717**	.764**	.820**	.742*	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Konsisi Ekonomi (X4)

Correlations						
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Kondisi Ekonomi
X4.1	Pearson Correlation	1	.818**	.428*	.174	.712**
	Sig. (2-tailed)		.000	.018	.359	.000
	N	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	.818**	1	.417*	.173	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000		.022	.362	.000
	N	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	.428*	.417*	1	.492**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.018	.022		.006	.000
	N	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	.174	.173	.492**	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.359	.362	.006		.000
	N	30	30	30	30	30
Kondisi Ekonomi	Pearson Correlation	.712**	.707**	.845**	.694**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

E. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations								
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.528**	.571*	.191	.360	.298	.623**
	Sig. (2-tailed)		.003	.001	.313	.050	.109	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.528**	1	.625*	.620**	.597**	.682**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.571**	.625**	1	.629**	.529**	.570**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.003	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.191	.620**	.629*	1	.621**	.767**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.313	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.360	.597**	.529*	.621**	1	.714**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.050	.000	.003	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.298	.682**	.570*	.767**	.714**	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.109	.000	.001	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.623**	.857**	.816*	.800**	.804**	.853**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 3.1.4 Hasil Uji Validitas

A. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	1	.185	.125*	.193*	.189*	.196*	.185*	.177*	.193*	.181*	.249*
	Sig. (2- tailed)		.380	.196	.338	.358	.319	.380	.428	.338	.403	.611
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	-.085	1	.321*	.040	-.129	-.141	-.124	-.112	-.135	-.118	.208*
	Sig. (2- tailed)	.380		.001	.678	.180	.145	.200	.247	.162	.222	.030
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	-.125	.321*	1	.474*	-.121	-.207*	-.182	-.164	-.199*	-.173	.323**
	Sig. (2- tailed)	.196	.001		.000	.210	.031	.058	.088	.039	.072	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	-.093	.040	.474*	1	.113	-.153	-.135	-.122	-.147	-.129	.358**
	Sig. (2- tailed)	.338	.678	.000		.244	.111	.162	.206	.126	.183	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X1.5	Pearson Correlation	-.089	-.129	-.121	.113	1	.593*	.051	-.117	-.141	-.123	.375**
	Sig. (2-tailed)	.358	.180	.210	.244		.000	.595	.226	.143	.202	.000
	N	100	100	109	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	-.096	-.141	-.207*	-.153	.593*	1	.370*	-.127	-.153	-.134	.342**
	Sig. (2-tailed)	.319	.145	.031	.111	.000		.000	.188	.111	.165	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	-.085	-.124	-.182	-.135	.051	.370*	1	.193*	.040	-.118	.332**
	Sig. (2-tailed)	.380	.200	.058	.162	.595	.000		.045	.678	.222	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	-.077	-.112	-.164	-.122	-.117	-.127	.193*	1	.638*	.105	.373**
	Sig. (2-tailed)	.428	.247	.088	.206	.226	.188	.045		.000	.279	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	-.093	-.135	-.199*	-.147	-.141	-.153	.040	.638*	1	.418**	.387**
	Sig. (2-tailed)	.338	.162	.039	.126	.143	.111	.678	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	-.081	-.118	-.173	-.129	-.123	-.134	-.118	.105	.418*	1	.201*
	Sig. (2-tailed)	.403	.222	.072	.183	.202	.165	.222	.279	.000		.048
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Pemahaman	Pearson Correlation	-.049	.208*	.323*	.358*	.375*	.342*	.332*	.373*	.387*	.190*	1
	Sig. (2-tailed)	.611	.030	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.048	

Peera tura n Perp ajaka n	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).													
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).													

B. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)

Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah
X2.1	Pearson Correlation	1	.687**	.457**	.303**	.250*	.252*	.707**
	Sig. (2- tailed)		.000	.000	.002	.012	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.687**	1	.571**	.321**	.288**	.264**	.741**
	Sig. (2- tailed)	.000		.000	.001	.004	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.457**	.571**	1	.674**	.471**	.195	.786**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000		.000	.000	.052	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.303**	.321**	.674**	1	.557**	.311**	.732**
	Sig. (2- tailed)	.002	.001	.000		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.250*	.288**	.471**	.557**	1	.460**	.692**
	Sig. (2- tailed)	.012	.004	.000	.000		.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.252*	.264**	.195	.311**	.460**	1	.596**	
	Sig. (2-tailed)	.012	.008	.052	.002	.000		.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Pearson Correlation	.707**	.741**	.786**	.732**	.692**	.596**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
X3.1	Pearson Correlation	1	.621*	.656*	.501**	.515**	.456**	.420*	.397**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.621*	1	.648*	.510**	.377**	.453**	.408*	.409**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.656*	.648*	1	.658**	.498**	.501**	.363*	.415**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.501*	.510*	.658*	1	.549**	.546**	.336*	.391**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.515*	.377*	.498*	.549**	1	.675**	.512*	.555**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.456*	.453*	.501*	.546**	.675**	1	.600*	.701**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.420*	.408*	.363*	.336**	.512**	.600**	1	.703**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.397*	.409*	.415*	.391**	.555**	.701**	.703*	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Moder nisasi Sistem Admini strasi Perpajakan	Pearson Correlation	.741*	.721*	.771*	.737**	.785**	.824**	.717*	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Kondisi Ekonomi (X4)

Correlations						
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Kondisi Ekonomi
X4.1	Pearson Correlation	1	.491**	.302**	.176	.571**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.080	.000

	N	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.491**	1	.457**	.402**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.302**	.457**	1	.702**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.176	.402**	.702**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	.080	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kondisi Ekonomi	Pearson Correlation	.571**	.733**	.874**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

F. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations								
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.756**	.460*	.345**	.457**	.402**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.756**	1	.485*	.537**	.538**	.527**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.460**	.485**	1	.645**	.375**	.367**	.702**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.345**	.537**	.645*	1	.457**	.553**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.457**	.538**	.375*	.457**	1	.665**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.402**	.527**	.367*	.553**	.665**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.752**	.842**	.702*	.750**	.773**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 3.1.5 Hasil Uji Coba Uji Reliabilitas

A. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.740	10

B. Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.802	6

C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	8

D. Konsisi Ekonomi (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.703	4

E. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.880	6

Lampiran 3.1.6 Hasil Uji Reliabilitas

A. Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ^a	N of Items
.693	.705	10

B. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.798	.803	6

C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.893	.894	8

D. Kondisi Ekonomi (X4)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.743	.745	4

E. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.858	.859	6

Lampiran 3.1.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.327	4.214		2.451	.016		
	Tingkat Pemahaman Peeraturan Perpajakan	.379	.247	.127	1.531	.129	.998	1.002
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	.561	.082	.577	6.811	.000	.963	1.039

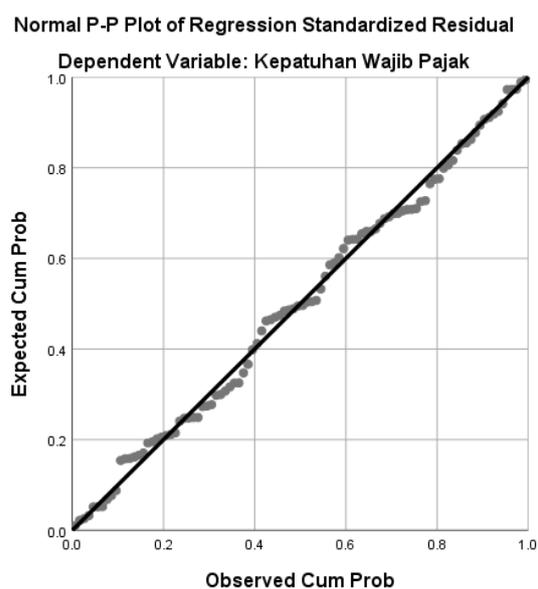
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.022	.058	-.032	-.372	.711	.957	1.045
Kondisi Ekonomi	-.058	.109	-.046	-.534	.595	.945	1.058

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

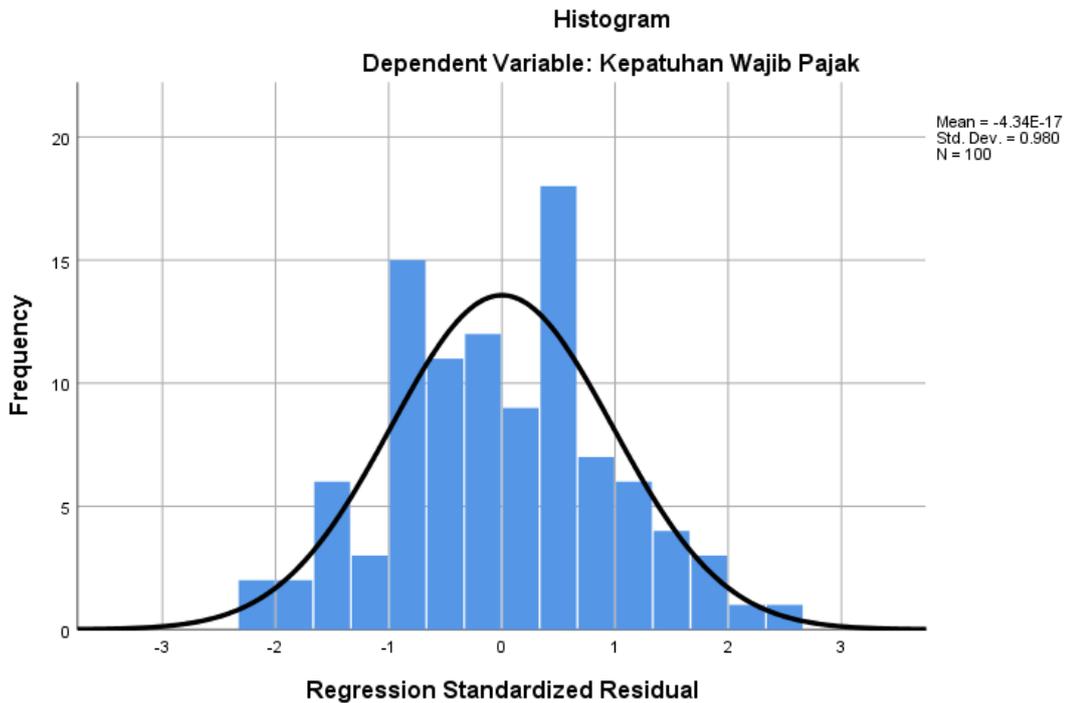
Lampiran 3.1.8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28913659
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.049
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 3.1.9 Hasil Uji Normalitas P-Plot



Lampiran 3.1.10 Hasil Uji Normalitas Histogram

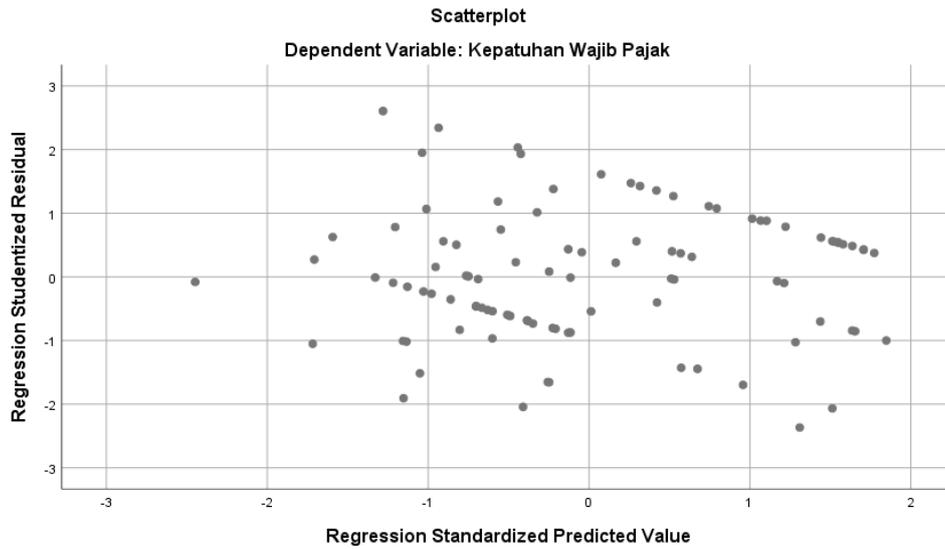


Lampiran 3.1.11 Hasil Uji Heteroskedasitas Glejser

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.411	2.513		.561	.576
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.049	.148	.034	.331	.741
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.001	.049	-.002	-.018	.985
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.024	.035	-.072	-.687	.493
	Kondisi Ekonomi	.047	.065	.075	.716	.476

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 3.1.12 Hasil Uji Heteroskedasitas Scatterplot



Lampiran 3.1.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.327	1.728		5.978	.000
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.379	.101	.189	3.733	.000
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.022	.024	-.047	-.908	.366
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.561	.034	.858	16.612	.001
	Kondisi Ekonomi	-.058	.045	-.068	-1.302	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 3.1.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.756	.746	.958

a. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Lampiran 3.1.15 Hasil Uji Parsial (uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.327	1.728		5.978	.000
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.379	.101	.189	3.733	.000
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-.022	.024	-.047	-.908	.366
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.561	.034	.858	16.612	.001
	Kondisi Ekonomi	-.058	.045	-.068	-1.302	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 3.1.16 Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270.386	4	67.596	73.638	.000 ^b
	Residual	87.206	95	.918		
	Total	357.592	99			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Lampiran 4.1 Balasan Surat Izin Riset dari Direktorat Jenderal Pajak

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I <small>GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II, JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50173 TELEPON (024) 3544065; 3544055; FAKSIMILE (024) 3540416; LAMAN www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id</small>	
Nomor	: S-33/WPJ.10/WPJ.105/2023	12 April 2023
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 Set	
Hal	: Persetujuan Ijin Riset an Dilatul Aghniya	
Yth. Dilatul Aghniya		
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 1368/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan informasi:		
NIM	:	2005046026
Kategori Riset	:	Gelar-S1
Jurusan/Fakultas/Perguruan Tinggi	:	Akuntansi Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam / UIN Walisongo Semarang
Judul Riset	:	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Mordernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)
Izin Yang Diminta	:	Data/Kuesioner/Wawancara
	:	Keterangan : Data yang ada s/d tahun 2022
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Kanwil DJP Jawa Tengah I, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:		
<ol style="list-style-type: none">1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 12 April 2023 s/d 12 Oktober 2023;2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset. Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat		
		
Mahartono		

Lampiran 5.1 Balasan Surat Izin Riset dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp./Fax (024) 3584086, Hunting 3584077 Psw 2710-712 SEMARANG - 50135

Nomor : B/1600/SIB/IV/2023
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 18 April 2023

Kepada Yth :
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di
- SEMARANG

Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1368/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2023 perihal permohonan riset /penelitian.

4. Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan mahasiswa Saudara a.n. :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Dilatul Aghniya	2005046026	SI Akuntansi Syariah

Untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tanggal 10 April – 31 Desember 2023, sepanjang mahasiswa yang bersangkutan menaati peraturan dan bersikap sopan selama pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

5. Demikian untuk menjadikan maklum.

An-Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang
Sekretaris


MI. SRIWAHYU WIDYASTUTI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19670821 198803 2 012

Lampiran 6.1 Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dilatul Aghniya
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 Januari 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Sawo RT. 03/RW. 02. No. 66 Kelurahan
Danawarih. Kecamatan Balapulang. Kabupaten Tegal
Nomor Telepon/HP : 085640432417
Email : dilatulaghniya2101@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. TK IT Asy Syifa | Tahun 2007-2008 |
| 2. SD N 03 Danawarih | Tahun 2008-2014 |
| 3. SMP N 1 Lebaksiu | Tahun 2014-2017 |
| 4. SMA N 3 Slawi | Tahun 2017-2020 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2020-2023 |

RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--|-----------|
| 1. IMT UIN Walisongo Semarang | 2021-2022 |
| 2. EKSMUD DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 2021-2022 |
| 3. Tax Center UIN Walisongo Semarang | 2022-2023 |

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Desember 2023

Dilatul Aghniya